

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gagasan tentang *civil society* tampak semakin mendapat tempat dalam wacana publik Indonesia. Kendati baru digunakan sejak akhir dekade 1990, istilah *civil society* dengan terjemahan yang beragam, seperti “masyarakat sipil, masyarakat madani, masyarakat warga atau masyarakat kewargaan.¹ Istilah masyarakat madani mulai digunakan secara luas di Indonesia sejak 1995 setelah diperkenalkan oleh Anwar Ibrahim, yang waktu itu menjabat sebagai wakil Perdana Menteri Malaysia, dalam ceramahnya pada Festival Istiqlal di Jakarta pada Nopember 1995. Dalam makalahnya, dia mencatat bahwa masyarakat madani, yang dinyatakannya sebagai terjemahan dari *civil society* dalam bahasa Inggris atau *al-mujtama' al-madani* dalam bahasa arab, adalah masyarakat bermoral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dan stabilitas masyarakat, dimana masyarakat memiliki daya dorong usaha dan inisiatif individual.²

Menurut Ibrahim, masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dan masyarakat berupa pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintah yang

¹ Hendro Prasetyo dkk, *Islam & Civil Society*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm.1.

² Ibid., hlm. 157.

berdasarkan undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu.³ Namun demikian, mewujudkan masyarakat madani tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Membentuk masyarakat madani memerlukan proses panjang dan waktu, serta menuntut komitmen masing-masing warga bangsa ini untuk mereformasi diri secara total dan konsisten dalam suatu perjuangan yang gigih.

Pada intinya, masyarakat madani adalah masyarakat yang tidak terlalu tergantung pada peran penguasa negara. Ia adalah masyarakat yang memiliki kesadaran *kolektif*⁴ dalam menentukan kebijakan yang menyangkut kepentingan umum. Kesadaran kolektif ini harus terekspresikan pula dalam kesadaran sejarah, kesadaran tentang fakta sosial, dan kesadaran tentang martabat manusia sebagai makhluk merdeka, baik sebagai individu ataupun sebagai sebuah makhluk moral. Dalam konteks Islam kesadaran ini terkait dengan kesadaran kewajiban *beramar makruf nahi mungkar*.

Nabi Muhammad SAW. pernah bersabda di dalam hadis beliau sebagai berikut:

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
لَتَأْتِ مُرٌّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُؤْتِيَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا
لِإِرْوَاهِ التِّرْمِذِيُّ . وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ لِأَمْنِهِ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ .

³ Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat madani*, (Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2008), Cet, ke-3, hlm. 176.

⁴ Kolektif : Secara bersama / secara gabungan

Artinya: “Hudzaifah berkata bahwa Nabi SAW bersabda: “Demi Allah yang jiwaku ada di tangan-Nya, kamu harus menganjurkan kebaikan dan mencegah kemunkaran, atau kalau tidak, pasti Allah akan menurunkan siksa kepadamu, kemudian kamu berdoa, maka tidak diterima doa dari kamu.” (H.R. At-Tirmidzi, dan menurutnya hadis tersebut hasan).⁵

Umat Islam diperintahkan untuk mengajak saudara-saudaranya sesama manusia, khususnya umat Islam, untuk berbuat kebaikan yang diperintahkan Allah dan menjauhi kesesatan yang dilarang-Nya. Amar ma’ruf dan nahi munkar sangat penting dalam ajaran Islam. Mereka yang melakukannya akan mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan, sebagaimana dijanjikan Allah, dalam Al-Qur’an:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

﴿العمران : ١٠٤﴾ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf⁶ dan mencegah dari yang munkar,⁷ merekalah orang-orang yang beruntung”. (QS. Al-Imran: 104)⁸

Kebahagiaan dan keberuntungan tentu saja tidak hanya milik mereka yang melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar, tetapi juga bagi mereka yang diajaknya apabila menuruti ajakan tersebut. Manusia terkadang lupa diri, tidak ingat tujuan

⁵ Rachmat Syafe’i, *Al-Hadis; Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) hlm. 235.

⁶ Ma’ruf : segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah.

⁷ Munkar : segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. ASY-SYIFA’, 1998), hlm.50

hidup dan hendak kemana setelah hidup. Akibatnya, Ia berbuat semena-mena tanpa kendali, tidak dapat membedakan mana perbuatan yang harus dilakukan dan mana yang harus dihindari. Keadaan seperti itu dapat dihindari atau dikurangi bila ada segolongan orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka mereka sesungguhnya telah menolong saudaranya yang tengah lalai tersebut. Allah SWT. berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴿التوبة: ٧١﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar.” (Q.S. At-Taubah: 71)⁹

Sebaliknya, orang yang tidak peduli terhadap perbuatan saudaranya sesama muslim, bahkan mengajak untuk melakukan perbuatan yang dilarang syara' atau merasa senang jika melihat saudaranya terjerumus dalam perbuatan tercela yang dilarang Islam dan dipandang buruk bahkan merintangi mereka yang akan berbuat kebaikan, mereka itu tergolong sebagai orang yang munafik. Allah SWT. berfirman:

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

⁹ Ibid., hlm. 158

الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ

الْفَاسِقُونَ ﴿التوبة: ٦٧﴾

Artinya: “Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka menggenggamkan tangannya. mereka Telah lupa kepada Allah, Maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. (Q.S. At-Taubah: 67)¹⁰

Dengan demikian, amar ma'ruf dan nahi munkar sangat besar pengaruhnya bagi ketentraman hidup manusia, baik untuk individu maupun untuk masyarakat. Tidak heran bila Al-Qur'an menyebutkan bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan salah satu kewajiban umat Islam yang merupakan umat terbaik. Allah SWT. berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَأْمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ

الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿العمران: ١١٠﴾

Artinya : “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan

¹⁰ Ibid., hlm. 157

kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Al-Imran: 110)¹¹

Bagi bangsa Indonesia umumnya, Kalimantan Selatan khususnya masyarakat madani merupakan wujud masyarakat yang menjadi harapan masyarakat di masa depan sebagai masyarakat Indonesia baru. Di Kalimantan Selatan sendiri yang mayoritas masyarakatnya beragama islam sedangkan penduduk asli Kalimantan Selatan umumnya suku Banjar yang intinya terdiri dari beberapa suku, yaitu suku Maayan, Lawangan dan Bukiat yang mengalami percampuran dengan suku bangsa Melayu yaitu suku Jawa dan Bugis. Oleh karena itu timbulah adanya perbedaan agama, untuk mewujudkan sikap toleransi yang tinggi terhadap saudara sesama agama maupun terhadap umat beragama, sangat penting adanya peran Kader GOLKAR dalam pembinaan beragama di Kalimantan Selatan.

Perwujudan masyarakat madani tidak sebatas ucapan dan tidak dapat dinyatakan dalam bentuk verbal tetapi masyarakat yang madani hanya akan terwujud apabila tatanan hidup dalam sistem masyarakat madani mampu dinyatakan dengan tindakan sehari-hari. Hal ini dimulai dengan pemberdayaan manusia sebagai elemen pokok dari suatu masyarakat. Dan membangun individu tidak dapat terjadi secara seponan, melainkan melalui proses sosialisasi panjang dengan pendidikan. Karena tatanan masyarakat madani memiliki beberapa muatan karakteristik individu manusia, misalnya sikap, moral, kebiasaan, nilai, dan kepribadian, maka membangun masyarakat madani dari perspektif pendidikan

¹¹ Ibid., hlm. 50

melibatkan mekanisme membangun sikap, sampai dengan terbentuknya kepribadian manusia itu.

Seperti yang dijelaskan Djohar, masyarakat madani yang dianalogikan dengan *civil society* adalah suatu kondisi masyarakat yang dilandasi oleh *civilize society*, karena *civilize society* menjadi prasarat terwujudnya masyarakat madani itu. Artinya untuk menyongsong terwujudnya masyarakat madani itu perlu dipersiapkan masyarakat yang memiliki peradapan sebagai masyarakat yang beradab. Kuncinya adalah masyarakat tidak hanya diwarnai oleh pemerintah sebagai penguasa, akan tetapi justru lebih diwarnai oleh berbagai partisipasi masyarakat.

Pendidikan tidak hanya dilaksanakan secara kurikuler di sekolah, melainkan dilaksanakan oleh semua pihak yang memiliki massa masyarakat. Sehingga setiap undang-undang setiap pendidikan seperti Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1988 tentang Sistem Pendidikan Nasional harus selalu dicermati kemungkinan keterlibatan semua pihak sistem masyarakat dalam pendidikan, jangan hanya mengatur pelaksanaan pendidikan di sekolah dan kurang melibatkan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat umumnya.

Setiap organisasi masyarakat memiliki tanggung jawab pendidikan secara proposional, sehingga mekanisme control terhadap masyarakat tidak seberat seperti sekarang ini. Di dalam masyarakat madani hak asasi bukan dimaknakan

sebagai penonjolan akan hak-hak pribadi, akan tetapi justru diarahkan kepada semakin besarnya penghargaan kita terhadap hak-hak orang lain.¹²

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan atau pembinaan memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat madani. Dengan kata lain, perwujudan masyarakat madani sangat ditentukan oleh pendidikan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Semakin tinggi pendidikan suatu masyarakat semakin besar pula kemungkinan terwujudnya masyarakat madani dalam masyarakat tersebut, begitu juga sebaliknya. Karena esensi dari masyarakat madani ialah adanya kemandirian, kesukarelaan, kewaspadaan, dan keterikatan, partisipasi, dan toleransi. Dalam mewujudkan masyarakat madani tidak dapat dilakukan secara individu karena tujuannya adalah pembentukan masyarakat. Di Indonesia kesadaran akan pentingnya masyarakat madani masih sangat minim. Salah satu faktor pendukungnya adalah tingkat pendidikan, lingkungan, dan kebijakan pemerintah yang belum memihak pada prinsip kemandirian.

Salah satu faktor yang ingin peneliti angkat adalah pembinaan atau istilah lain pendidikan. Biasanya pembinaan atau pendidikan dilakukan oleh lembaga-lembaga formal pemerintah di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Departemen Agama atau non formal swadaya masyarakat. Tapi kali ini dilakukan oleh sebuah partai politik nasional.

Partai Golongan Karya atau Partai Golkar merupakan salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Partai Golkar berdiri pada akhir era kepemimpinan

¹² Jacob, *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 301

Presiden Soekarno. Guna menghadapi kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tanggal 20 Oktober 1964 terbentuklah Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang terdiri dari pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani dan nelayan yang dihimpun oleh golongan militer khususnya Angkatan Darat. Sekber Golkar merupakan sebuah tempat bagi golongan fungsional yang tidak terpengaruh akan politik tertentu. Partai Golongan Karya pada era pemerintahan Presiden Soeharto selalu unggul dalam perolehan suara, dari mulai pemilu 1971 hingga 1997. Keunggulan politik inilah yang membuat Golkar pada waktu itu selalu menguasai eksekutif dan legislatif di Indonesia hampir 30-an tahun.

Sejalan dengan cita-cita para bapak pendiri Negara (*the founding fathers*) kita bahwa tujuan kita bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ikut menciptakan perdamaian dunia, maka partai Golkar sebagai pengemban cita-cita proklamasi menegaskan visi perjuangannya untuk menyertai perjalanan bangsa mencapai cita-citanya.

Partai Golkar berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berakhlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka, berkesadaran hukum dan lingkungan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaan serta disiplin yang tinggi.

Dengan Visi ini maka partai Golkar hendak mewujudkan kehidupan politik nasional yang demokratis melalui pelaksanaan agenda-agenda reformasi

politik yang diarahkan untuk melakukan serangkaian koreksi terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap seluruh bidang kehidupan.¹³

Bangsa Indonesia mempunyai penduduk yang mayoritas beragama Islam. Dalam kenyataannya masyarakat belum memaksimalkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam. Untuk itu Partai GOLKAR mencoba untuk membumikan ajaran agama Islam melalui pembinaan keislaman kader. Dengan adanya pembinaan tersebut diharapkan kader-kader dambaan bangsa ini akan terwujud.

Berangkat dari latar belakang di atas penulis memandang pentingnya untuk meneliti *“Peran Kader Golongan Karya (GOLKAR) Dalam Pembinaan Kehidupan Beragama Di Kalimantan Selatan”*. Penulis memilih Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Selatan sebagai studi kasus dalam penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang diatas, permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

- Bagaimana Peran Kader Golongan Karya (GOLKAR) dalam Pembinaan Kehidupan Beragama di Kalimantan Selatan untuk mewujudkan masyarakat madani ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹³ Tim Litbang Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009*, (Jakarta: Buku Kompas. 2004), hlm. 398.

- Untuk mengetahui Peran Kader Golongan Karya (GOLKAR) di Kalimantan Selatan dalam Pembinaan kehidupan Beragama guna terwujudnya masyarakat madani.

D. Signifikansi penelitian

Penelitian yang dilakukan ini, di harapkan dapat berguna untuk :

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini lebih mendalam.
2. Bahan literatur bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lanjutan tentang masalah ini namun dari sudut yang berbeda.
3. Sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah khususnya dan IAIN Antasari pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu adanya batasan istilah agar lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Kader adalah Anggota Partai Golkar yang telah mengikuti pendidikan dan latihan Kader disaring atas dasar kriteria.¹⁴ Yaitu Anggota Partai

¹⁴ Dewan Pimpinan Daerah, *Buku Pintar Partai Golongan Karya*, (Kalimantan Selatan, 2010), hlm. 31

golongan Karya (GOLKAR) di Dewan perwakilan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Golongan Karya (GOLKAR) adalah sebuah partai politik di Indonesia. Yaitu Dewan perwakilan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Masyarakat Madani suatu keberadaan masyarakat yang dalam batas-batas tertentu mampu memajukan dirinya sendiri melalui penciptaan aktifitas mandiri, dalam satu ruang gerak yang tidak memungkinkan Negara melakukan intervensi.¹⁵ Yaitu masyarakat yang mandiri, terbuka, berkesadaran hukum dan lingkungan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaan serta disiplin yang tinggi.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh sebab itu penulis membuat tinjauan pustaka dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang dimaksud yaitu penelitian yang dilakukan oleh M. Markani (0901130056) Mahasiswa IAIN Antasari Fakultas Syariah dengan judul “Etika Berpolitik dalam Perspektif Dewan Pengurus Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah”. Dalam penelitiannya tersebut mengangkat suatu permasalahan tentang etika berpolitik dan bagaimana tinjauan politik islam menurut DPD GOLKAR Kotawaringin Timur.

¹⁵ Jacob., op. cit., hlm. 109

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut: Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan. Secara umum mengenai gambaran permasalahan yang akan diteliti. Bab II merupakan landasan teoritis, Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian. Bab III adalah metode penelitian, yang terdiri dari: jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian dari awal sampai penelitian ini di munaqasyahkan. Bab IV adalah laporan hasil penelitian, pada bab ini berisi tentang hasil penelitian secara sistematis terdiri atas: Penyajian data dan Analisis data, kemudian dianalisis dengan metode analisis data yang ditetapkan dan selanjutnya dilakukan pembahasan tentang analisis tersebut. Bab V adalah bab terakhir sebagai penutup. Dalam bab ini penulis memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembinaan Kehidupan Beragama

1. Pengertian Pembinaan Beragama

Kehidupan beragama salah satu diantara sekian banyak sektor harus mendapatkan perhatian besar bagi bangsa dibandingkan dengan sektor kehidupan yang lain. Agama yang semata-mata hanya bersumberkan kepada aspirasi pemikiran manusia, belum dapat dikategorikan sebagai agama. Walaupun ada sementara orang mengatakan hal itu adalah agama, itu hanya ditinjau dari segi istilahnya saja. Tapi hakekatnya tidak tepat. Sebab ajarannya adalah hasil daripada konsepsi pemikiran manusia yang tidak mampu untuk menjamin kebahagiaan hidup baik dalam dunia, apalagi akhirat nanti. Oleh karena itu pencapaian pembangunan bangsa yang bermoral dan beradab sangat ditentukan dari aspek kehidupan agama, terutama dalam hal pembinaan.

Secara harfiah pembinaan berarti pemeliharaan secara dinamis dan berkesinambungan. Di dalam konteksnya dengan suatu kehidupan beragama, maka pengertian pembinaan beragama adalah segala usaha yang dilakukan untuk

menumbuhkan kesadaran memelihara secara terus menerus terhadap tatanan nilai agama agar segala perilaku kehidupannya senantiasa di atas norma-norma yang ada dalam tatanan itu. namun perlu dipahami bahwa pembinaan tidak hanya berkisar pada usaha untuk mengurangi serendah-rendahnya tindakan-tindakan negatif yang dilahirkan dari suatu lingkungan yang bermasalah, melainkan pembinaan harus merupakan terapi bagi masyarakat untuk mengurangi perilaku buruk dan tidak baik dan juga sekaligus bisa mengambil manfaat dari potensi masyarakat.¹⁶

2. Konsep dan Bentuk Pembinaan Keislaman

Memahami suatu bentuk pembinaan keislaman terlebih dahulu harus dipahami bagaimana konsep Islam mengenai kehidupan dimana pembinaan itu diarahkan. Bahkan tidak hanya sampai di sini, untuk bisa memahami konsepsi kehidupan beragama secara tepat dan efektif kita harus mengadakan kajian mendalam tentang apa yang sebenarnya nilai-nilai yang dikandung Islam dalam memberikan konsep kehidupan. Karena itu, Islam memberikan suatu konsep mengenai kehidupan keagamaan, sehingga lahirlah dua dimensi. Pertama mengenai ‘Akidah (kepercayaan), kedua Syariah (peraturan).¹⁷

Dengan demikian pembinaan yang serupa inilah yang kita maksudkan bahwa pembinaan akan menjadi kompleks. Dengan titik tolak bahwa cara demikian mencapai tujuan dari pembinaan yang diidam-idamkan, yaitu berupa

¹⁶ Matdawan, Noor, *Pembinaan Akidah Islamiyah*, (Yogyakarta: LIBERTY OFFSET, 1984), hlm. 2.

¹⁷ Syaltut, Syekh Mahmud, *Akidah Dan Syariah Islam 2*, (Jakarta: BUMI AKSARA, 1985), hlm. 249.

realitas Islam yang membawa kesuksesan manusia dalam mengarungi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.

Berikut ini lebih jauh dapat dijelaskan aspek-aspek yang paling utama yang harus dicapai oleh setiap individu, seperti dua dimensi di atas, meliputi:

a) Aqidah

Akidah (kepercayaan) adalah bidang teori yang perlu dipercayai terlebih dahulu sebelum yang lain-lain. Kepercayaan itu hendaklah bulat dan penuh, tiada bercampur dengan keraguan dan kesamaran. 'Akidah itu hendaklah: menurut ketetapan keterangan-keterangan yang jelas dan tegas dari ayat-ayat Qur'an serta telah menjadi kesepakatan kaum muslimin sejak penyiaran Islam dimulai, biarpun dalam hal yang lain-lain telah timbul kemudiannya berbagai pendapat yang berbeda-beda.

Akidah merupakan seruan dan penyiaran yang pertama dari Rasulullah, dan dimintanya supaya dipercayai oleh manusia dalam tingkat pertama. Itu pula seruan setiap Rasul yang diutus Allah kepada umat manusia dimasa yang lalu, sebagaimana diceritakan dalam Qur'an dalam menceritakan riwayat Nabi-nabi dan Rasul-rasul.¹⁸

Akidah menurut bahasa adalah perjanjian atau ikatan. Sedangkan menurut istilah Akidah adalah pendapat atau pemikiran yang dapat diyakini kebenarannya dan dikuatkan dengan dalil-dalil Al-Qur'an. Setelah kita mengetahui arti akidah, baik menurut bahasa maupun istilah, maka kita dapat memberikan kesimpulan

¹⁸ Syekh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, (Jakarta: BUMI AKSARA, 1984), hlm. 3

tentang aqidah. Dan apabila kita jelaskan mengandung pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya. Sebagai dasar dalam memahami aqidah Islam secara luas perlu disebutkan berbagai landasan yang tersirat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Al-Qur'an dan Al-Hadits tersebut sebagai pelengkap atau sebagai penguat dari pemikiran.¹⁹

Untuk mengetahui arah aqidah Islam, aqidah itu sendiri mempunyai tujuan, agar umat Islam tidak simpang siur dalam memahami. Di dalam keterangan di atas aqidah islam mempunyai tujuan sebagai berikut:²⁰

- a. Percaya kepada yang gaib meliputi percaya kepada Allah yang menciptakan alam semesta, percaya adanya malaikat, turunnya wahyu, adanya hari akhir, adanya surga maupun neraka, siksa dan pahala, hisap dan makhluk-makhluk halus lainnya yang tidak bisa dilihat oleh pancaindera.
- b. Percaya kepada kitab suci yang diturunkan Allah kepada para rasul-Nya, yaitu kitab suci Al-Quran, Injil, Zabur, dan Taurat. Disamping itu juga mempercayai para rosul dan nabi sebagai manusia pilihan yang diutus oleh Allah untuk menyeru kepada segenap umat manusia. Rosul dan nabi sebagai manusia pilihan itu dibekali oleh Allah berupa mukjizat.
- c. Percaya adanya qada dan qadar yaitu ketentuan baik dan buruk dari Allah SWT. Dengan demikian, secara rasional akal dapat menerima pernyataan Tuhannya sebagai landasan keyakinan hidupnya.

¹⁹ Zuhri dan Suyono, *Aqidah Akhlak*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 1995), hlm 9-10

²⁰ Ibid., hlm. 12

- d. Islam merangkum aqidah, ibadah, dan muamalah. Semua itu harus dijadikan pedoman hidup bagi setiap muslim. Artinya setiap umat Islam harus menyakini pokok-pokok aqidah Islam tersebut. Orang yang meyakini akan kebenaran aqidah Islam itu disebut orang yang beriman atau mukmin.
- e. Bukti bahwa seseorang telah beriman terhadap aqidah Islam yaitu mereka melaksanakan perintah dan menghindari diri dari larangan yang ditentukan oleh Allah SWT. dan rosul-Nya. Menjalankan perintah serta menjauhi larangan yang ditentukan Allah dan rosul-Nya disebut ibadah. Ibadah artinya mengabdikan atau menghambakan diri kepada Allah dengan jalan mematuhi segala ketentuan-ketentuan-Nya.

b) Syariah

Syariah ialah susunan, peraturan dan ketentuan yang disyariatkan Tuhan dengan lengkap atau pokok-pokoknya saja, supaya manusia mempergunakannya dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan saudara seagama, hubungan dengan saudaranya sesama manusia serta hubungannya dengan alam besar dan kehidupan.²¹

Ruang lingkup syariah, antara lain mencakup peraturan-peraturan sebagai berikut:²²

- 1) Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur, hubungan langsung dengan Allah SWT, yang terdiri dari:

²¹ Ibid., hlm. 73

²² Abu Ahmadi dan Noor Salimi, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991) hlm. 239

- a. Rukun Islam: mengucapkan syahadatain, mengerjakan shalat, zakat, puasa, dan haji.
 - b. Ibadah lainnya yang berhubungan dengan rukun Islam.
- 2) Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan lainnya dalam hal tukar-menukar harta di antaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpanan, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiyat, nafkah, titipan, jizyah, pesanan dan lain-lain.
- 3) Munakhahat, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hubungan berkeluarga diantaranya: perkawinan, perceraian, pengaturan nafkah, penyusuan, pemeliharaan anak, pergaulan suami istri, mas kawin, berkabung dari suami yang wafat, meminang, khulu', li'an, dzihar, ila, walimah, dan lain-lain.
- 4) Jinayat, yaitu pengaturan yang menyangkut pidana, di antaranya: qishas, diyat, kifarat, pembunuhan, zina, minuman keras, murtad, khianat dalam berjuang, kasaksian, dan lain-lain.
- 5) Siyasah, yaitu yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, diantaranya: ukhuwah, musyawarah, keadilan, tolong-menolong, kebebasan, toleransi, tanggung jawab sosial, kepemimpinan, pemerintahan dan lain-lain.
- 6) Akhlak, yaitu yang mengatur sikap hidup pribadi, di antaranya: syukur, sabar, rendah diri, pemaaff, tawakkal, istiqamah, berani, berbuat baik terhadap ayah dan ibu, dan lain-lain.

- 7) Peraturan-peraturan lainnya seperti: makanan, minuman, sembelihan, berburu, nazar, pemberantasan kemiskinan, pemeliharaan anak yatim, masjid, da'wh, perang dan lain-lain.

c) Hubungan Aqidah Dengan Syariah.

Aqidah sebagai ketentuan-ketentuan dasar mengenai keimanan seorang muslim adalah merupakan landasan dari segala perilakunya, bahkan sebenarnya akidah merupakan pedoman bagi seseorang berperilaku di muka bumi. Oleh karena itu aqidah tidak hanya berfungsi sebagai landasan secara pasif, karena aqidah tidak hanya merupakan ukuran untuk mengukur perilaku seseorang itu sesuai atau tidak, akan tetapi aqidah itu pun merupakan titik tolak untuk seseorang berperilaku.

Sebagai contoh orang yang mendirikan shalat adalah orang yang melaksanakan aqidah, untuk melaksanakan aqidah tersebut secara baik, maka akan tumbuhlah kreatifitas manusia untuk menemukan tutup aurat yang indah, teknik penjernihan air yang baik, dan untuk menentukan waktu yang tepat lahirnya falak, astronomi dan lain-lain.

Bahkan untuk dapat melaksanakan shalat berjamaah dapat melahirkan suatu penemuan dan perkembangan ilmu arsitektur khususnya di dalam konstruksi masjid, demikian pula halnya untuk orang melaksanakan shalat, zakat, naik haji akan lahirnya berbagai macam kreatifitas baik yang bersifat ilmu maupun pemakaiannya.²³

²³ Ibid., hlm. 254

B. Masyarakat Madani

1. Pengertian Masyarakat Madani

Masyarakat madani berasal dari bahasa Inggris, *civil society*. Kata *civil society* sebenarnya berasal dari bahasa latin yaitu *civitas dei* yang artinya kota illahi dan *cociety* yang berarti masyarakat. Dari kata *civil* akhirnya membentuk kata *civilization* yang berarti peradapan. Oleh sebab itu, *kata civil society* dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat kota. Yakni masyarakat yang telah berperadapan maju. Konsepsi ini, menurut Nurcholis Majid; pada awalnya lebih merujuk pada dunia Islam yang ditunjukkan oleh masyarakat kota Arab. Sebaliknya, lawan dari kata atau istilah masyarakat nonmadani adalah kaum pengembara, badawah, yang masih membawa citranya yang kasar, berwawasan pengetahuan yang sempit, masyarakat puritan, tradisional penuh mitos dan takhayul, banyak memainkan kekuasaan dan kekuatan, sering dan suka menindas, serta sifat-sifat negative lainnya.

Gellner menyatakan bahwa masyarakat madani akan terwujud ketika menjadi tatanan masyarakat yang harmonis, yang bebas dari eksploitasi dan penindasan. Pendek kata, masyarakat madani ialah kondisi suatu komunitas yang jauh dari monopoli kebenaran dan kekuasaan. Kebenaran dan kekuasaan adalah milik bersama. Setiap anggota masyarakat madani tidak bisa ditekan, ditakut-takuti, ditakut-takuti, diganggu kebebasannya, semakin dijauhkan dari demokrasi, dan jenisnya. Oleh karena itu, perjuangan menuju masyarakat madani pada hakikatnya merupakan proses panjang dan produk sejarah yang abadi, dan produk

sejarah yang abadi, dan perjuangan melawan kezaliman dan dominasi para penguasa menjadi ciri utama masyarakat madani.

Sementara itu, Seligman, seperti yang dikutip Mun'im, mendefinisikan istilah *civil society* sebagai seperangkat gagasan etis yang mengejutkan dalam berbagai tatanan sosial, dan yang paling penting dari gagasan ini adalah usahanya untuk menyelaraskan berbagai konflik kepentingan antar individu, masyarakat, dan Negara. Sedangkan *civil society* menurut Havel seperti yang dikutip Hikam ialah rakyat sebagai warga Negara yang mampu belajar tentang aturan-aturan main melalui dialog demokratis dan penciptaan bersama batang tubuh politik partisipatoris yang murni. Gerakan penguatan *civil society* merupakan gerakan untuk merekonstruksi ikatan solidaritas dalam masyarakat yang telah hancur akibat kekuasaan yang monolitik. Secara normatif-politis, inti strategi ini adalah usaha untuk memulihkan kembali pemahaman asasi bahwa rakyat, sebagai warga Negara, memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada para penguasa atas segala yang mereka lakukan atas nama pemerintah.

Istilah madani menurut Munawir sebenarnya berasal dari bahasa Arab, madaniy. Kata madaniy berakar dari kata kerja madana yang berarti mendiami, tinggal, atau membangun. Kemudian berubah istilah menjadi madaniy yang artinya beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil atau perdata. Dengan demikian, istilah madaniy dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Hall, yang menyatakan bahwa masyarakat madani identik dengan *civil society*, artinya suatu ide, angan-angan, bayangan, cita-cita suatu komunitas yang dapat terjawantahkan ke dalam kehidupan sosial.

Dalam masyarakat madani, pelaku sosial akan berpegang teguh pada peradapan dan kemanusiaan. Hefner menyatakan bahwa masyarakat madani merupakan masyarakat modern yang bercirikan kebebasan dan demokratisasi dalam berinteraksi di masyarakat yang semakin plural dan heterogen. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat diharapkan mampu mengorganisasikan dirinya dan tumbuh kesadaran diri dalam mewujudkan peradapan. Mereka akhirnya mampu mengatasi dan berpartisipasi dalam kondisi global, kompleks, penuh persaingan dan perbedaan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani pada prinsipnya memiliki multimakna, yaitu masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, konsisten, memiliki perbandingan, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, mengakui emansipasi, dan hak asasi, namun yang paling dominan adalah masyarakat yang demokratis.²⁴

2. Konsep Masyarakat Madani

Pada dasarnya gagasan masyarakat madani sebenarnya bukanlah sebuah wacana baru. Raharjo menyatakan bahwa istilah masyarakat *civil society* sudah ada sejak zaman sebelum masehi. Orang pertama kali mencetuskan istilah *civil society* ialah Cicero, sebagai orator Yunani kuno. *civil society* menurut Cicero ialah suatu komunitas politik yang beradap seperti yang dicontohkan oleh masyarakat kota yang memiliki kode hukum sendiri. Dengan konsep *civility*

²⁴ Srijanti dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 197-199

(kewargaan) dan urbaniti (budaya kota), maka kota dipahami bukan hanya sekedar konsentrasi penduduk, melainkan juga sebagai pusat peradaban dan kebudayaan.

Istilah madani selain mengacu pada konsep *civil society*, juga berdasarkan Pada konsep Negara-kota Madinah yang dibangun nabi Muhammad SAW pada tahun 622M. Masyarakat madani juga mengacu pada konsep tamadun (masyarakat yang berperadapan) yang diperkenalkan oleh Ibn Khaldun, dan konsep Al Madinah al fadhilah (Madinah sebagai Negara Utama) yang diungkapkan oleh filsuf Al Farabi pada abad pertengahan.

Menurut Dr Ahmad Hatta, peneliti pada lembaga pengembangan Pesantren dan Studi Islam, Al Haramain, Piagam Madinah adalah dokumen penting yang membuktikan betapa sangat majunya masyarakat yang dibangun kala itu. Disamping juga memberikan penegasan mengenai ketegasan hukum dan konstitusi sebuah masyarakat. Pendapat hamidullah, Piagam Madinah ini adalah konstitusi tertulis pertama dalam sejarah manusia. Konstitusi ini secara mencengangkan telah mengatur apa yang sekarang orang ributkan tentang hak-hak sipil (*civil rights*), atau lebih dikenal dengan hak asasi manusia (HAM), jauh sebelum Deklarasi kemerdekaan Amerika, Revolusi Prancis, dan Deklarasi Universal PBB tentang HAM dikumandangkan.

Secara formal, piagam Madinah mengatur hubungan sosial antarkomponen masyarakat. Pertama, antar sesama muslim, bahwa sesama muslim adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku. Kedua, hubungan antara komunitas muslim dengan nonmuslim didasarkan pada prinsip bertetangga baik, saling membantu

dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasehati, dan menghormati kebebasan beragama.

Ada dua nilai dasar yang tertuang dalam Piagam Madinah. Pertama, prinsip kesederajatan dan keadilan; kedua, inklusisme atau keterbukaan. Kedua prinsip itu lalu dijabarkan, dan ditanamkan dalam bentuk beberapa nilai universal, seperti konsistensi, keseimbangan, moderat dan toleran.

Sementara itu konsep masyarakat madani, atau dalam khazanah Barat dikenal sebagai *civil society* (masyarakat sipil), muncul pada masa pencerahan (*Renaissance*) di Eropa melalui pemikiran *John Locke* (abad ke-18) dan Emmanuel Kant (abad ke-19). Sebagai sebuah konsep, *civil society* berasal dari proses sejarah panjang masyarakat Barat yang biasanya dipersandingkan dengan konsepsi tentang *state* (negara). Dalam tradisi Eropa abad ke-18, pengertian masyarakat sipil ini dianggap sama dengan Negara (*the state*), yakni suatu kelompok atau kekuatan yang mendominasi kelompok lain.

Barulah pada paruh kedua abad ke-18, terminologi ini mengalami pergeseran makna. Negara dan masyarakat madani kemudian dimengerti sebagai dua buah entitas yang berbeda. Bahkan kemudian, Kant menempatkan masyarakat madani dan Negara dalam kedudukan yang berlawanan, yang kemudian dikembangkan oleh *Hegel*, menurutnya masyarakat madani merupakan subordinatif dari Negara.

Adapun tokoh yang pertama kali menggagas istilah *civil society* ini adalah *Adam Ferguson* dalam bukunya, "Sebuah Esai tentang Sejarah Masyarakat Sipil (*An Essay on The History of Civil Society*)" yang terbit tahun 1773 di Skotlandia.

Ferguson menekankan masyarakat madani pada visi etis kehidupan bermasyarakat. Pemahamannya digunakan untuk mengantisipasi perubahan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri, dan munculnya kapitalisme, serta mecoloknya perbedaan antara individu.

Lebih lanjut lagi, menurut Profesor Ryass Rasyid dalam diskusi dengan harian Kompas, konsep masyarakat madani lahir pasca revolusi Industri di Eropa Barat, yakni ketika kondisi ekonomi masyarakat sudah semakin baik, dan mampu membayar pajak. Masyarakat sadar, sumbangsih mereka bagi pendapatan Negara semakin penting, sehingga mereka menuntut hak-haknya, sehingga muncul jargon politik: tidak ada pajak tanpa suara. Dalam kondisi demikian, masyarakat menghendaki adanya semacam kekuatan tawar-menawar (*bargain*) yang seimbang terhadap Negara.

Di Indonesia, perjuangan masyarakat madani dimulai pada awal pergerakan kebangsaan, dipelopori oleh Syarikat Islam, dan dilanjutkan oleh Soelton Syahrir pada awal kemerdekaan. Jiwa demokrasi Soelton Syahrir ternyata harus menghadapi kekuatan represif, baik dari rezim Orde Lama maupun rezim Orde Baru. Tuntutan perjuangan transformasi menuju masyarakat madani pada era reformasi ini tampaknya sudah tak terbendungkan lagi.²⁵

3. Karakteristik dan Ciri-Ciri Masyarakat Madani

Ada tiga karakteristik dasar dalam masyarakat madani, yaitu:

²⁵ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara; Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2012), hlm. 83

1. Diakuinya semangat pluralisme. Artinya, pluralisme telah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan, sehingga mau tidak mau, pluralitas merupakan sesuatu yang kodrati (given) dalam kehidupan. Pluralisme bertujuan mencerdaskan umat melalui perbedaan konstruktif dan dinamis, dan merupakan sumber dan motivator terwujudnya kreativitas, yang terancam keberadaannya jika tidak terdapat perbedaan. Satu hal yang menjadi catatan penting bagi kita adalah sebuah peradaban yang kosmopolit akan tercipta manakala manusia memiliki sikap inklusif, dan mempunyai kemampuan (ability) menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar. Namun, dengan catatan, identitas sejati atas parameter-parameter otentik agama tetap terjaga.
2. Tingginya sikap toleransi. Baik terhadap saudara sesama agama maupun terhadap umat agama lain. Secara sederhana toleransi dapat diartikan sebagai sikap suka mendengar, dan menghargai pendapat dan pendirian orang lain. Senada dengan hal itu, Quraish Shihab menyatakan bahwa tujuan agama tidak semata-mata mempertahankan kelestariannya sebagai sebuah agama. Namun, juga mengakui eksistensi agama lain dengan memberinya hak hidup berdampingan, dan saling menghormati satu sama lain.
3. Tegaknya prinsip demokrasi. Demokrasi bukan sekedar kebebasan dan persaingan, demokrasi adalah bukan pula suatu pilihan untuk bersama-sama membangun, dan memperjuangkan perikehidupan warga dan masyarakat yang semakin sejahtera.

Masyarakat madani (*civil society*) dicirikan dengan masyarakat terbuka, bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan Negara, kritis dan berpartisipasi aktif serta egaliter.²⁶ Ketakwaan kepada Tuhan yang Tinggi, hidup berdasarkan sains dan teknologi, berpendidikan tinggi, mengamalkan nilai hidup modern dan progresif, mengamalkan nilai kewarganegaraan, akhlak dan moral yang baik, mempunyai pengaruh yang luas dalam proses membuat keputusan, dan menentukan nasib masa depan yang baik melalui kegiatan sosial, politik, dan lembaga masyarakat.

4. Faktor-Faktor dalam Membangun Masyarakat Madani Indonesia

Indonesia, pada masa reformasi ini, membutuhkan tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani. Kondisi Indonesia yang dilanda euphoria demokrasi, semangat otonomi daerah, dan derasnya globalisasi membutuhkan masyarakat yang mempunyai kemauan dan kemampuan hidup bersama dalam sikap saling menghargai, toleransi, dalam kemajemukan yang tidak saling mengeksklusifkan terhadap berbagai suku, agama, bahasa, dan adat yang berbeda. Kepedulian, kesantunan, dan setia kaan merupakan sikap yang sekaligus menjadi prasarana yang diperlukan bangsa Indonesia.

Pengembangan masyarakat madani di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Kebudayaan, adat istiadat, pandangan hidup, kebiasaan, rasa sepenanggungan, cita-cita dan hasrat bersama sebagai warga dan sebagai bangsa, tidak mungkin lepas dari lingkungan serta

²⁶ Adeng Muchtar Ghazali, *Civic Education; Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Islam*, (Bandung: DEHILMAN PRODUCTION, 2004), hlm 108.

sejarahnya. Lingkungan dan akar sejarah kita, warga dan bangsa Indonesia, sudah diketahui baik kekurangan maupun kelemahan, juga diketahui kelebihan dan keunggulannya. Diantara keunggulan bangsa Indonesia, adalah berhasilnya proses akulturasi dan inkulturasi yang kritis dan konstruktif.

Pada saat ini, ada pertimbangan lain mengapa pengembangan masyarakat madani harus secara khusus kita beri perhatian. Kita hidup dalam zaman, dimana interaksi tidak saja berlangsung secara domestic dan regional, tetapi sekaligus secara global. Dari idiom yang kita pakai, kemauan dan kemampuan kita untuk adaptasi, akulturasi, dan ikulturasi, lebih-lebih lagi sangat kita perlukan dalam masa reformasi menuju demokratisasi dewasa ini.

Hidayat Nur Wahid mencirikan masyarakat madani sebagai masyarakat yang memegang teguh ideology yang benar, berakhlak mulia, secara politik, ekonomi, budaya bersifat mandiri, serta memiliki pemerintah sipil. Sedangkan menurut Hikam, ciri-ciri masyarakat madani adalah: (a) adanya kemandirian yang cukup tinggi di antara individu-individu dan kelompok masyarakat terhadap Negara, (b) adanya kebebasan menentukan wacana dan praktik politik di tingkat public, dan (c) kemampuan membatasi kekuasaan Negara untuk tidak melakukan intervensi.

Untuk membangun masyarakat madani di Indonesia, ada enama faktor yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Adanya perbaikan sektor ekonomi, dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat, dan dapat mendukung kegiatan pemerintah.

2. Tumbuhnya intelektualitas dalam rangka membangun manusia yang memiliki komitmen untuk independen.
3. Terjadinya pergeseran budaya dari masyarakat yang berbudaya paternalistik menjadi budaya yang lebih modern dan independen.
4. Berkembangnya pluralism dalam kehidupan yang beragam.
5. Adanya partisipasi aktif dalam menciptakan tata pamong yang baik.
6. Adanya keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang melandasi moral kehidupan.

Implementasi keenam faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Perbaikan kegiatan perekonomian.**

Perbaikan ekonomi dilakukan dengan memperdayakan potensi dan kemauan masyarakat untuk memberi lapangan pekerjaan, dan menciptakan lapangan kerja. Pada tahun 2005, di Indonesia terdapat lebih dari 35 juta penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yang mendapatkan BLT (bantuan langsung tunai). Statistik juga menunjukkan bahwa 50% kehidupan masyarakat berasal dari sector pertanian, dan 90% bentuk badan usaha adalah usaha kecil dan menengah. Data juga menunjukkan bahwa usaha ini hanya menyerap kurang dari 30% dana perbankan. Di sisi lain, sektor ini menunjukkan telah berhasil lolos dari krisis moneter, dan relatif berhasil dibandingkan dengan skala usaha besar. Memperhatikan data ini, maka beberapa program dapat dijalankan yaitu:

- a. Mendorong masyarakat membuat kegiatan ekonomi produktif yang berbasis sumber daya lokal, dan mengumpulkan potensi modal yang ada di masyarakat.
- b. Mengembangkan usaha dalam bentuk kelompok atau koperasi, dalam rangka memenuhi skala usaha yang sehat, mengembangkan potensi pasar, dan kemudahan akses pembinaan.
- c. Masyarakat yang mempunyai tingkat teknologi, baik dari PT atau dari pemerintah dapat membentuk lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfungsi sebagai incubator bisnis UKM. Fungsi inkubator ini adalah memberikan bimbingan teknologi, bimbingan manajemen, kesehatan lingkungan, permodalan dan pemasaran. Apabila UKM sudah mandiri, maka dilepas dari inkubator, dan mendidik UKM yang lain, serta UKM yang mandiri mendidik UKM yang belum mandiri.
- d. Membirikan semangat motivasi untuk berusaha secara ulet, tekun, jujur dan hemat, tidak berputus asa, serta berdoa kepada Tuhan, setelah bekerja dengan maksimal.
- e. Mengembangkan semangat cinta produksi dalam negeri dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan.
- f. Mendidik UKM untuk taat pada peraturan perundangan, membayar kewajiban, seperti pajak dan retribusi, kepada pemerintah dalam mendukung kegiatan pemerintah.

- g. Melatih kemandirian dalam berusaha, dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah, mengembangkan bisnis dengan membuat jaringan usaha yang semakin besar, serta melakukan kerja sama untuk pengembangan produk atau jasa secara mandiri.
- h. Mendorong pemerintah membuat kebijakan tentang pengembangan usaha kecil dan menengah, terutama di sektor pertanian dan industri pertanian, serta manufaktur atau jasa lainnya.
- i. Mendorong pemerintah memberikan kebijakan pengalokasian kredit modal pada usaha kecil dan menengah. Kebijakan ini tetap memberikan semangat pembelajaran, oleh sebab itu bantuan modal bukan dalam bentuk subsidi. Usaha kecil dan menengah tetap dibebankan bunga, sebagaimana ditentukan oleh perbankan, serta menanggung faktor resiko usaha, sedang pemerintah membantu dalam proses administrasi yang terkait dengan penjaminan.

2. Membangun Intelektual yang Berkomitmen dan Independen.

Masalah intelektualitas bagi Indonesia merupakan masalah yang relatif Berat. hal ini disebabkan hampir 60% penduduk berpendidikan SD, Human Development index (HDI) Indonesia sangat rendah, dan ini mencerminkan rendahnya mutu pendidikan, pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan, masih maraknya tontonan yang berbau mistik. Selain itu hasil penelitian perguruan tinggi banyak yang masih terbatas tersimpan di perpustakaan. Untuk membangun masyarakat yang intelek, berkomitmen serta independen, maka perlu dilakukan sebagai berikut:

- a. Membangun masyarakat ilmiah yang beranggotakan dan bersifat Sukarela. masyarakat ilmiah ini bercirikan: mengambil keputusan Dengan menggunakan data dan fakta, bukan sekadar gosip. Dalam Mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan pikiran yang logis atau nalar, serta menggunakan metode yang terbukti kebenarannya. Membangun masyarakat ilmiah ini dapat dilakukan dengan membuat forum diskusi, memberikan kebebasan kepada siswa dan Mahasiswa untuk berpikir kritis dan menjauhkan doktrinisasi.
- b. Meningkatkan mutu pendidikan seperti wajib belajar, dan meningkatkan partisipasi kasar, yaitu siswa meneruskan perkuliahan. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan anggaran pendidikan sampai 20% dari APBN, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam memberikan beasiswa bagi yang tidak mampu, atau mendirikan yayasan pendidikan yang bersifat sosial.
- c. Mengembangkan sistem pendidikan yang demokratis, di mana guru menjadi fasilitator, dan menempatkan siswa dan mahasiswa yang belajar .memberikan ruang untuk bertanya dan berdiskusi terhadap setiap permasalahan, sehingga mahasiswa mempunyai keberanian mengemukakan pendapat.
- d. Mengembangkan organisasi, baik untuk siswa maupun mahasiswa dan masyarakat, sebagai wadah untuk berinteraksi sosial serta mengembangkan sikap yang independen.

- e. Mengembangkan sikap mental yang bertanggung jawab di masyarakat, dengan memberikan hak untuk mengemukakan pendapat berupa kritik dan saran, serta mampu mempertanggungjawabkan, baik berupa hak jawab dan penyelesaian masalah berdasarkan hukum.

3. Membangun Masyarakat yang Berbudaya Modern.

Modernisasi budaya adalah suatu transformasi budaya, baik menyangkut teknologi dan aspek organisasi, dari yang tradisional ke arah pola-pola ekonomis dan politis, yang menjadi ciri masyarakat yang setabil. Transformasi budaya ini termasuk didalamnya aspek budaya modern yang teratur, urbanisasi, dan peningkatan pendapatan, sedangkan, aspek organisasi meliputi lembaga kemasyarakatan, norma, lapisan sosial, dan interaksi sosial.

Syarat-syarat untuk membangun masyarakat modern adalah:

- a. Cara berpikir yang ilmiah yang melembaga dalam sistem pemerintahan dan masyarakat. Pola pikir ilmiah ini dapat dilakukan dengan memperbaiki system pendidikan dan pengajaran yang terencana, dan dilakukan dengan demokratis.
- b. Sistem administrasi yang baik, dan menunjukkan adanya tata pamong atau tata kelola, akuntebel, dapat ditukar, dan dibatasi oleh waktu.
- c. Sistem pengumpulan data yang baik dan teratur dapat dilakukan dengan membangun sistem informasi, sehingga diperoleh data yang akurat.
- d. Penciptaan iklim yang menyenangkan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan penggunaan alat-alat komunikasi massa, dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat.

- e. Tingkat organisasi yang tinggi yang dicirikan dengan disiplin, jujur dan tepat waktu, dan dilakukan tanpa mengurangi kemerdekaan orang lain.

4. Membangun Pluralisme yang Beragam.

Manusia di dunia dan di Indonesia pada khususnya menghadapi masalah pluralisme. Indonesia memiliki banyak suku bangsa, hampir 400 suku, banyak agama dan kepercayaan, bahasa, adat istiadat, lapisan masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang berbeda. Pada situasi yang demikian, membangun pluralism menjadi sangat penting, sehingga walaupun berbeda-beda, kita dapat mengembangkan kerja sama yang baik dan harmonis, karena Indonesia menganut semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Dalam rangka membangun pluralisme, maka beberapa hal perlu dilakukan, yaitu:

- a. Meningkatkan rasa hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan kepercayaan, terutama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
- b. Meningkatkan hubungan antarpemeluk agama untuk tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada pemeluk agama lain.
- c. Mengembangkan sikap saling mencintai dan mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban sebagai manusia Indonesia.
- d. Mengembangkan pergaulan antarsuku, antaragama, antardaerah, sehingga terbangun rasa saling mencintai dan memiliki.
- e. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama.
- f. Menjalankan hidup dengan sederhana, tidak boros, dan tidak bergaya hidup mewah.

5. Membangun Partisipasi Aktif Masyarakat.

Ciri masyarakat madani, salah satunya adalah kemampuan membatasi kekuasaan Negara supaya tidak melakukan intervensi terhadap kehidupan sosial masyarakat. Terkait dengan ini, maka akan sangat baik apabila masyarakat berperan aktif dalam memberikan pengawasan kepada pemerintah, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih.

Langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka good governance adalah:

- a. Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan rakyat seperti DPR, DPRD I, DPRD II, dan DPD. Wakil rakyat harus dapat berperan sebagai pnyalur aspirasi dari yang diwakilkanya.
- b. Membangun kemandirian lembaga peradilan dari intervensi pemerintah dan pihak lain.
- c. Membangun aparatur Negara yang profesional dan peuh integritas.
- d. Membangun peran serta masyarakat yang kuat dan mandiri, serta bermoral.
- e. Penguatan otonomi daerah dalam rangka mengurangi kesenjangan antar daerah.
- f. Membangun keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang melandasi moral kehidupan.

Ciri yang membedakan antara masyarakat madani di Indonesia dengan civil society di Negara barat, adalah semua gerak masyarakat di Indonesia berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME. Apabila civil society

didasarkan pada ajaran moral dan bersifat universal, maka masyarakat madani berdasarkan ajaran moral dari Tuhan YME.²⁷

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan pada suatu objek, tempat, atau lingkungan, untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi dalam rangka memperbaiki atau menyempurnakan suatu keadaan.²⁸

²⁷ Srijanti dkk., op. cit., hlm. 206-212

²⁸ Saifuddin Azwar, *Metode penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 21

Adapun sifat penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.²⁹ Lokasi penelitian ini bertempat di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Selatan, yang berlokasi di: Jl. Lambung Mangkurat, No. 10, Banjarmasin. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa dilokasi ini berkumpulnya para kader-kader partai GOLKAR yang lebih aktif dalam pembinaan.

B. Subyek dan Objek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah Kader Partai Golongan Karya DPD Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan obyek penelitian ini adalah tentang Pembinaan Kehidupan Beragama untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Di Kalimantan Selatan.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang akan digali dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data dari apa yang menjadi objek dalam penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang melengkapi dan menunjang data primer yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, identitas responden dan wawancara dengan responden.

2. Sumber Data

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), Cet. ke-13, hal. 142

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.³⁰ Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

- a. Responden yaitu Kader partai Golongan Karya Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 8 orang.
- b. Dokumen yaitu catatan-catatan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh dan mengumpulkan data di lapangan, maka teknik yang digunakan adalah:

- a. Wawancara, adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.³¹
- b. Observasi, yaitu metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.³²

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), Cet. ke- 8, hlm. 102

³¹ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), Cet. ke- 7, hlm. 180

³² Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 93-94

- c. Kepustakaan, yaitu mempelajari buku-buku literatur yang sesuai untuk mendapatkan dasar-dasar teoritis yang diperlukan sebagai landasan dalam penelitian.³³
- d. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya,³⁴ yang berhubungan dengan data yang akan diteliti.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data

- a. Editing, yaitu penulis meneliti kembali catatan data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.³⁵
- b. Kategorisasi, yaitu semua data yang terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan kronologis permasalahan yang diteliti.
- c. Interpretasi, yaitu menafsirkan data yang perlu ditafsirkan kedalam bentuk uraian.

2. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif, yaitu mengkaji secara mendalam hasil penelitian dan membahasnya mengacu pada landasan teoritis serta literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), Cet. ke- 7, hlm. 112

³⁴ Suharsimi Arikunto., op. cit., hlm. 200

³⁵ Bambang Sunggono., op. cit., hlm. 125-126

F. Tahapan Penelitian

Dalam upaya mencapai hasil yang diharapkan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

a. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis melakukan observasi terhadap masalah yang akan diteliti dalam rangka pembuatan proposal untuk diajukan kepada pembimbing, selanjutnya diajukan guna mendapatkan persetujuan dan diseminarkan.

b. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis mempersiapkan segala hal yang berkenaan dengan penelitian, seperti melengkapi berbagai surat menyurat untuk keperluan penelitian dan menyampaikan kepada pihak yang terkait.

c. Tahap Pengolahan Data dan Analisis Data

Pada tahap ini penulis mengolah data hasil penelitian sesuai dengan teknik pengolahan data, untuk mendapatkan kesimpulannya kemudian dianalisis secara kualitatif.

d. Tahap Penyusunan Laporan

Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan seluruh data berdasarkan sistematika yang telah disusun. Untuk kesempurnaanya, maka dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan, sehingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasahkan di hadapan Tim Penguji Skripsi.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Partai Golkar

Sejarah Partai Golkar bermula pada tahun 1964 dengan berdirinya Sekber Golkar di masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Sekber Golkar didirikan Oleh golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI, menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda,

wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).

Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh politik tertentu. Terpilih sebagai ketua pertama Sekber Golkar adalah Brigadir Jendral (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprpto Sukowati Lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Desember 1965.

Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi.

Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar ini dikelompokkan berdasarkan keayaannya ke dalam 7 (tujuh) kelompok induk organisasi (KINO), yaitu:

- 1) Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)
- 2) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
- 3) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
- 4) Organisasi Profesi

- 5) Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)
- 6) Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
- 7) Gerakan Pembangunan Untuk Menghadapi Pemilu 1971

Kino yang merupakan kekuatan inti dari Sekber Golkar tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (GOLKAR), logo dan nama ini, sejak pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang.

Pada Pemilu 1971 ini, Sekber Golkar ikut serta menjadi salah satu Kontestan. Pihak parpol memandang remeh keikutsertaan GOLKAR sebagai kontestan Pemilu. Mereka meragukan kemampuan komunikasi politik GOLKAR kepada grassroot level. NU, PNI dan Parmusi yang mewakili kebesaran dan kejayaan masa lampau sangat yakin keluar sebagai pemenang.

Mereka tidak menyadari kalau perpecahan dan kericuhan internal mereka telah membuat tokoh-tokohnya berpindah ke GOLKAR. Hasilnya di luar dugaan, GOLKAR sukses besar dan berhasil menang dengan 34.348.673 suara atau 62,79% dari total perolehan suara. Perolehan suaranya pun cukup merata di seluruh provinsi, berbeda dengan parpol yang berpegang kepada basis tradisional.

NU hanya menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai katolik di Nusa Tenggara timur, PNI di Jawa Tengah, Parmusi di Sumatra Barat dan Aceh. Sedangkan Murba tidak memperoleh suara signifikan sehingga tidak memperoleh kursi DPR. Kemudian, sesuai ketentuan dalam ketetapan MPRS

mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber GOLKAR mengubah dirinya menjadi GOLKAR.

GOLKAR menyatakan diri bukan parpol karena terminologi ini mengandung pengertian dan pengutamaan politik dengan mengesampingkan pembangunan dan karya. September 1973, GOLKAR menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya. Mayjen Amir Murtono terpilih sebagai Ketua Umum. Konsolidasi GOLKAR pun mulai berjalan seiring dibentuknya wadah-wadah profesi, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).

Setelah Peristiwa G30S maka Sekber GOLKAR, dengan dukungan sepenuhnya dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan PKI, kemudian juga kekuatan Bung Karno. Pada dasarnya Golkar dan TNI-AD merupakan punggung rezim militer Orde Baru.

Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar. Keluarga besar Golongan Karya sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi.

Pemuka ketiga jalur tersebut melakukan fungsi pengendalian terhadap Golkar lewat dewan Pembina yang mempunyai peran strategis. Pimpinan Pemilu dalam Pemilu Golkar yang berlambang beringin ini selalu tampil sebagai pemenang. Kemenangan Golkar selalu diukir dalam pemilu di tahun 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997, sampai arus reformasi bergulir.

Tuntutan mundur Presiden Soeharto menggema di mana-mana. Soeharto akhirnya berhasil dilengserkan oleh gerakan mahasiswa. Hal ini kemudian berimbas pada Golkar. Karena Soeharto adalah penasehat partai, maka Golkar juga dituntut untuk dibubarkan. Saat itu Golkar dicerca dimana-mana.

Akbar Tandjung yang terpilih sebagai ketua umum di era ini kemudian mati-matian mempertahankan partai. Di bawah kepemimpinan Akbar, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar. Saat itu Golkar juga mengusung citra sebagai Golkar baru. Upaya akbar tak sia-sia, dia berhasil mempertahankan Golkar dari serangan eksternal dan krisis citra, inilah yang membuat Akbar menjadi ketua umum Golkar yang cukup legendaris.

Partai Golkar kemudian ikut dalam Pemilu 1999, berkompetisi bersama partai-partai baru di era multipartai. Pada Pemilu pertama di era Reformasi ini Partai Golkar mengalami penurunan suara di peringkat kedua di bawah PDIP. Namun pada Pemilu berikutnya Golkar kembali unggul. Pada pemilu legislatif 2004 Golkar menjadi pemenang pemilu legislatif dengan 24.480.757 suara atau 21,58% suara sah.

Pada pemilu legislatif 2009 lalu suara Partai Golkar kembali turun keposisi dua. Pemenang pemilu dipegang oleh partai Demokrat. Dalam Munas VIII di

pekanbaru, Aburizal Bakrie terpilih sebagai ketua umum menggantikan Yusuf Kalla. Sebagai pimpinan baru partai beringin, Aburizal bertekad akan kembali membawa Golkar memenangkan pemilu. Dia menargetkan Golkar menjadi pemenang pertama pemilu legislatif 2014.

2. Visi dan Misi Partai Golkar Kalsel

Sejalan dengan cita-cita para bapak pendiri Negara (*the founding fathers*) kita bahwa tujuan kita bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ikut menciptakan perdamaian dunia, maka partai Golkar sebagai pengemban cita-cita proklamasi menegaskan visi perjuangannya untuk menyertai perjalanan bangsa mencapai cita-citanya.

Partai Golkar berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berakhlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka, berkesadaran hukum dan lingkungan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaan serta disiplin yang tinggi.

Dengan Visi ini maka partai Golkar hendak mewujudkan kehidupan politik nasional yang demokratis melalui pelaksanaan agenda-agenda reformasi politik yang diarahkan untuk melakukan serangkaian koreksi terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap seluruh bidang kehidupan. Reformasi pada sejatinya adalah upaya untuk menata kembali sistem kenegaraan kita disemua bidang agar kita dapat bangkit kembali dalam suasana yang lebih terbuka

dan demokratis. Bagi Partai Golkar upaya mewujudkan kehidupan politik yang demokratis yang bertumpu pada kedaulatan rakyat adalah cita-cita sejak kelahirannya.

Keterbukaan adalah nilai kemanusiaan hakiki yang merupakan nafas dari gerakan reformasi. Atas dasar pandangan keterbukaan tersebut, kita harus menciptakan sistem sosial politik yang terbuka atau transparan dengan struktur dan proses politik yang dapat secara efektif benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat. Untuk itu maka peluang bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses-proses politik mutlak dibuka seluas-luasnya. Kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat semakin terjamin dan dilindungi oleh undang-undang.

Sendi utama masyarakat madani adalah supremasi hukum. Oleh karena Negara kita adalah Negara hukum maka supremasi hukum harus ditempatkan sebagai pilar utama dalam rangka mewujudkan sistem politik yang demokratis dan berdasarkan hukum. Partai Golkar memandang bahwa reformasi hukum tidak terbatas hanya pada penyempurnaan sarana dan prasarana, materi dan aparatur hukum, tetapi juga budaya hukum.

Dibidang ekonomi visi Partai Golkar adalah ekonomi rakyat atau kerakyatan atas dasar keyakinan bahwa hanya sistem perekonomian inilah yang menjamin rakyat makin sejahtera. Pembangunan ekonomi dalam paradigma lama yang terlampau menekankan pertumbuhan dengan tulang punggung konglomerasi ternyata justru membawa Negara dan bangsa Indonesia terjerembab kedalam krisis ekonomi yang sangat parah. Konglomerasi ternyata semu dan sangat rapuh

terhadap guncangan ekonomi global. Dalam konteks ini, maka paradigma ekonomi kerakyatan justru memiliki potensi yang sangat kuat bagi penguatan fundamental ekonomi kita.

Dengan visi ekonomi kerakyatan ini, maka usaha kecil, menengah, dan koperasi akan dikembangkan dan diperkuat sebagai pilar utama perekonomian nasional. Partai Golkar menginginkan dimasa depan usaha menengah kecil dan koperasi menjadi ujung tombak pemberdayaan masyarakat dalam pengertian yang sebenarnya. Tanpa upaya-upaya pemberdayaan rakyat maka tujuan menciptakan masyarakat madani akan semakin jauh dari gapaian kita. Untuk itu sejalan dan searah dengan visi menciptakan kesejahteraan rakyat, perhatian terhadap upaya penguatan usaha menengah, kecil dan koperasi menjadi prioritas yang paling di utamakan.

Bidang sosial budaya, partai Golkar mencita-citakan penguatan budaya bangsa yang mampu melahirkan bangsa yang kuat, yakni bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau ketrampilan, memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki disiplin sosial yang tangguh dan memiliki etika yang kuat untuk menuju terciptanya bangsa yang kuat semacam itu, maka perlu dikembangkan suasana dan iklim yang mendukung bagi berkembangnya budaya ilmu (etos intelektualisme), budaya kerja (etos kerja), budaya disiplin dan budaya hidup etis dan religius di kalangan masyarakat.

Partai Golkar memandang kerukunan sebagai basis bagi integrasi bangsa. Untuk itu maka kehidupan sosial budaya yang berkeadilan dan terjembatannya kesenjangan sosial ekonomi antar individu, antar kelompok, antar kota-desa,

antara Jawa-luar Jawa dan antar pusat daerah, menjadi agenda penting yang harus dipentingkan demikian juga halnya pengebangan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama menjadi kepedulian Partai Golkar.

Dengan visi ini pula partai Golkar hendak mengembangkan pola hubungan sosial yang lebih harmonis dan dilandasi oleh semangat persamaan manusia. Pandangan yang diskriminatif dan tidak adil terhadap suatu kelompok tertentu harus dihapuskan dari segenap masyarakat kita dan diganti dengan pandangan yang diikuti oleh semangat kekeluargaan, kebersamaan dan persaudaraan sejati antar warga Negara.

Dengan rangka mengaktualisasikan doktrin dan mewujudkan visi tersebut Partai Golkar dengan ini menegaskan misi perjuangannya, yakni : Menegakkan, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa, demi untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan cita-cita Proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional disegala bidang untuk mewujudkan masyarakat demokratis, menegakkan supremasi hukum, mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan hak-hak asasi manusia.

Dalam rangka membawa misi mulia tersebut, partai GOLKAR melaksanakan fungsi-fungsi sebagai sebuah Partai Politik modern, yaitu:

Pertama ; mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik.

Kedua ; melakukan rekrutmen kader-kader yang berkualitas melalui sistem prestasi untuk dapat dipilih oleh rakyat menduduki posisi-posisi politik atau

jabatan-jabatan publik. Dengan posisi atau jabatan politik ini maka para kader dapat mengontrol atau mempengaruhi jalannya pemerintahan untuk diabdikan sepenuhnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Ketiga ; meningkatkan proses pendidikan dan komunikasi politik yang dialogis dan partisipatif, yaitu membuka diri terhadap berbagai pikiran, aspirasi dan kritik dari masyarakat.³⁶

3. Pengurus DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan Periode 2010-2015

Nama : H. A. SULAIMAN. HB

Kelahiran : Banjarmasin

Jabatan : Ketua

Nama : H. HASANUDDIN MURAD, SH

Kelahiran : Marabahan

Jabatan : Ketua Harian

Nama : H. HASNURYADI SULAIMAN, SE

Kelahiran : Banjarmasin

Jabatan : Wakil Ketua Bid. Organisasi

Nama : Ir. GUSTI PERDANA KUSUMA

Kelahiran : Banjarmasin

Jabatan : Wakil Ketua Bid. Kaderisasi

Nama : DR. H. BARDIANSYAH, MM

Kelahiran : Banjarmasin

Jabatan : Wakil Ketua Bid. PP I

³⁶ Dewan Pimpinan Daerah, *Buku Saku Kader Partai Golongan Karya*, (Kalimantan Selatan, 2014), hlm. 79

Nama : H. AHMAD RIFANI IWANSYAH

Jabatan : Wakil Ketua Bid. PP II

Nama : H. PUAR JUNAIDI, S.Sos

Jabatan : Wakil Ketua Bid. PP III

Nama : Drs. H. ABDUL WAHID, HK, M.Si

Jabatan : Wakil Ketua Bid. PP IV

Nama : SYARIFANI SABARHAN, SH

Jabatan : Wakil Ketua Bid. PP V

Nama : Hj. SYARIFAH RUGAYAH

Jabatan : Wakil Ketua Bid. Pengabdian Masyarakat

Nama : SUSAN, SH, MH

Jabatan : Wakil Ketua Bid.

Nama : Ir. GUSTI RINA ARHADI

Jabatan : Wakil Ketua Bid.

Nama : H. GUSTI RUDIANSYAH, SmHk

Jabatan : Wakil Ketua Bid.

Nama : TROY SATRIA, SE

Jabatan : Wakil Ketua Bid.

Nama : Drs. ALWIN KUMALA

Jabatan : Wakil Ketua Bid.

Nama : Hj. DEWI DAMAYANTI SAID, SE, MM

Jabatan : Wakil Ketua Bid.

Nama : H. GUSTI ABDURRAHMAN, SE

Jabatan : Wakil Ketua Bid.

Nama : ARRIDLA ARMAWAN Spdi

Jabatan : Wakil Ketua Bid.

Nama : Drs. SYARIFUDDIN SABANG

Jabatan : Wakil Ketua Bid.

Nama : H. MURHAN EFFENDIE, BA

Jabatan : Sekretaris

Nama : MURDIANSYAH, S.Sos, M.AP

Jabatan : Wakil Sekretaris Bid. Organisasi

Nama : H. GUSTI ZULLKARNAIN, ZE

Jabatan : Wakil Sekretaris Bid.

Nama : Drs. HASAN MAHLAN

Jabatan : Wakil Sekretaris Bid.

Nama : AHMAD RIZHANIE ANSHARI, ST

Jabatan : Wakil Sekretaris Bid.

Nama : H.M. THAMRIN.HI

Jabatan : Wakil sekretaris Bid.

Nama : AYKE MURFIATY,SE

Jabatan : Wakil sekretaris Bid.

Nama : H.M.BAYU BUDJANG,SH

Jabatan : Wakil sekretaris Bid.

Nama : M.ALI Wafa, Sos,M,si

Jabatan : Wakil sekretaris bidang pengabdian masyarakat

Nama : ARIFIN,SH

Jabatan : Wakil sekretaris Bid.

Nama : Drs.AKHMAD FANANI

Jabatan : Wakil sekretaris Bid.

Nama : SUMARNI,SH

Jabatan : Wakil sekretaris Bid.

Nama : JUNAIDI INAS ,S.Sos

Jabatan : Wakil sekretaris Bid.

Nama : ROSIDA ,SH

Jabatan : Wakil sekretaris Bid.

Nama : MURNIATI,S.AP

Jabatan : Wakil sekretaris Bid.

Nama : MUHAMMAD RIZANI NOOR,SE

Jabatan : Wakil sekretaris Bid.

Nama : M.SYARIFUDDIN
Jabatan : Wakil sekretaris Bid.

Nama : Hj.LILI IRIANTI MALA, SH
Jabatan : -

Nama : Drs.H.INDRO HANANTO
Jabatan : Bendahara

Nama : GUSTI ERVIN WARDHANA,SE
Jabatan : Wakil Bendahara

Nama : H.NURANI
Jabatan : Wakil Bendahara

Nama : Dra.GUSLIANA RUSIANI
Jabatan : Ketua Biro Bid.

Nama : RENI YULIANTI
Jabatan : Ketua Biro Bid.

Nama : ANWAR RHOFIEQ
Jabatan : Ketua Biro Bid.

Nama : AJAT MABUSNAL,S.Sos
Jabatan : Ketua Biro Bid.

Nama : PADLIANSYAH
Jabatan : Wakil Bendahara

Nama : RUSTAM EFFENDI

Jabatan : Ketua Biro Bid.

Nama : YUHERLI

Jabatan : Ketua Biro Bid.

Nama : ZEN YUSUF ALAMSYAH

Jabatan : Ketua Biro Bid.

Nama : LIANI FITRIADI,S.Sos

Jabatan : Ketua Biro Bid.

Nama : WAWAN WIRAWAN,S.pd

Jabatan : Ketua Biro Bid.

Nama : WIDYA MEILINDA MERAWATY

Jabatan : Ketua Biro Bid.

Nama : Drs.H.T.EKO HARYANTO,ME,MBA

Jabatan : Ketua Biro Bid.

Nama : INDRA GUNAWAN

Jabatan : Ketua Biro Bid.

Nama : Hj.DEWI RESTINA,SE

Jabatan : Ketua Biro Bid.

Nama : ERNAWATI,SH

Jabatan : Ketua Biro Bid.

Nama : RUDI DARMADI,SH

Jabatan : Ketua Biro Bid.

Nama : H.GUSTI RONNY

Jabatan : Ketua Biro Bid.

Nama : MADIATUL QIFTIAH,S.Hut

Jabatan : Ketua Biro Bid.

Nama : MUHAMMAD IMAN,S.Pdi

Jabatan : Ketua Biro Bid.

Nama : H.ALAMSYAH NOOR,SH

Jabatan : Ketua Biro Bid.

Nama : GUSTI SATRYA DHARMA,S.Sn

Jabatan : Ketua Biro Bid.

Nama : H.JANUAR

Jabatan : Ketua Biro Bid.

Nama : DEDY YANUARLI

Jabatan : Ketua Biro Bid.

Nama : EMILIA AGUS

Jabatan : Anggota Biro Bid.

Nama : AHMAD ISWANTO

Jabatan : Anggota Biro Bid.

Nama : Hj.SOPIATY HERJANTI,SE,SH,M.pd

Jabatan : Anggota Biro Bid.

Nama : ARIEF RACHMAN
Jabatan : Anggota Biro Bid.

Nama : SALASIAH,SE
Jabatan : Anggota Biro Bid.

Nama : NURJAMILAH MASKANARI,S.pd
Jabatan : Anggota Biro Bid.

Nama : RUDIANSYAH
Jabatan : Ketua Biro Bid.

Nama : BADRUN,S.Pd.i
Jabatan : Anggota Bid. Keagamaan.

Nama : ARIFIN NOOR,S.Sos
Jabatan : Anggota Biro Bid.

Nama : ADI KARTIKA SULISTYA, SE, Akt. MM
Jabatan : Anggota Biro Bid.

Nama : LUTFIA RAHMAN, SE
Jabatan : Anggota Biro Bid.

4. Fraksi DPR-RI dan DPRD Provinsi Partai Golongan Karya

Kalimantan Selatan.

Fraksi Partai Golkar DPR-RI Kalimantan Selatan

1) H GUSTI ISKANDAR SUKMA ALAMSYYA, SE

KETUA PMI KALSEL

KETUA PDK KOSGORO 1957 KALIMANTAN SELATAN

2) Ir H AHMADI NOOR SUPIT MM

KETUA DPP PARTAI GOLKAR KORWIL KALIMANTAN

KETUA BADAN ANGGARAN DPR-RI

Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Selatan

- 1) Kol.TNI. (Pur) NASIB ALAMSYAH (KETUA DPRD)
- 2) H. PUAR JUNAIDI, S.Sos (KETUA FRAKSI)
- 3) SUSAN, SH, MH
- 4) H.M. KARNO. HA (BENDAHARA FRAKSI)
- 5) DRS. SYARIFUDDIN SABANG
- 6) IR. GUSTI PERDANA KESUMA
- 7) DRS. H. MANSYAH SABRI (SEKRETARIS FRAKSI)
- 8) IR. H. HASMY FADILLAH AKBAR, MM
- 9) DR. H. BARDIANSYAH, MM (WAKIL KETUA FRAKSI)
- 10) HH. GUSTI RUDIANSYAH, SmHk

5. Deskripsi Peran Kader Golongan Karya (GOLKAR) Dalam Pembinaan Kehidupan Beragama Di Kalimantan Selatan.

Peran Kader Partai Golongan Karya dalam Pembinaan Kehidupan Beragama, yang penulis akan deskripsikan berikut ini adalah persepsi Kader GOLKAR DPD Provinsi Kalimantan Selatan yang terpilih sebagai berikut.

Responden:

1. Nama : Badrun, S.pd.I
- Tempat/tgl lahir : Kuala Kapuas, 9 Oktober 1985

Umur : 29 tahun
Pendidikan terakhir : SI. PAI
Jabatan Organisasi : Anggota Bidang Keagamaan.
Alamat : Jl. Sutoyo S. Komp. Hidayatullah. Rt/ Rw
30/02 . Banjarmasin.³⁷

Responden menjelaskan mengenai pentingnya peran kader dalam pembinaan keislaman di masyarakat. Karena dengan adanya program-program kegiatan ini partai golkar dapat lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Adapun bentuk-bentuk kegiatan rutin baik yang bersifat pembinaan atau kegiatan lain diantaranya:

- Peringatan tahun baru Islam
- Memperingati hari asyura
- Peringatan maulid nabi besar Muhammad saw
- Safari ramadhan di 13 kabupaten/kota se kalsel
- Megadakan Badan Amil Zakat.
- Halal bil halal seluruh pengurus partai golkar provinsi kalsel
- Menyembelih hewan qur'ban
- Mengadakan pengajian-pengajian
- Mengadakan Pesantren Kilat

³⁷ Badrun, Kader Partai Golkar, Wawancara Pribadi, Jam 14.00-16.00 Wita, DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan, 28 April 2014

- DII

Dari berbagai macam bentuk-bentuk kegiatan keagamaan diatas responden mengatakan bahwa untuk pembinaan itu lebih focus di pesantren kilatnya walaupun seperti pengajian-pengajian juga ada. Di dalam pesantren kilat diadakan materi-materi mengenai Akidah dan Akhlak. Yang rutin di adakan pada hari Islam adalah memperingati maulid di dalamnya ada kegiatan semarak maulid, dengan cara turun langsung ke lapangan di setiap 13 kabupaten kota, dengan mengadakan pengajian-pengajian.

Dalam setiap kegiatan-kegiatan tersebut sarana prasarana sudah di sediakan setiap 13 kabupaten kota masing-masing. Dengan adanya kegiatan itu responden menjelaskan masyarakat sangat mendukung dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut. Untuk hambatan pasti ada, salah satunya masalah keterlambatan anggaran tapi dapat di selesaikan pihak internal.

Upaya dalam mengatasi masalah tersebut anggaran dapat diperoleh dari Kader-Kader Golkar yang ada di Kabupaten kota tersebut. Hasil yang diinginkan dari adanya pembinaan ini untuk mewujudkan Visi dan Misi Partai Golkar, salah satunya terwujudnya suatu masyarakat madani yaitu masyarakat yang memiliki toleransi yang tinggi antar pemeluk agama lain.

2. Nama : H. Murhan Effendie, BA
Tempat/tgl lahir : Amuntai, 11 April 1953
Umur : 60 tahun

Pendidikan terakhir : Akademi Pemerintahan Dalam Negeri
Jabatan Organisasi : Sekretaris DPD Partai Golkar
Alamat : Jl. Ir. PHM Noor KP 71571 Tanjung
Kabupaten Tabalong, Kalsel³⁸

Responden kedua adalah bapak bapak H. Murhan, beliau banyak memberikan masukan atas wawancara yang saya laksanakan. Responden memberi keterangan bahwa bentuk-bentuk pembinaan keislaman yang di adakan oleh Partai Golongan Karya DPD Provinsi Kalimantan selatan diantaranya Semarak Maulid, Safari ramadhan, pengajian Al-Hidayah dan masih banyak lagi kegiatan yang lainnya.

Metode-metode yang digunakan dalam pembinaan dengan metode ceramah, diskusi dan lain sebagainya. Untuk perangkat yang digunakan dalam pembinaan tersebut seperti alat pengeras suara, alat tulis guna menunjang kelancaran dalam pembinaan tersebut. Faktor pendukung dalam pembinaan Islam dari masyarakat sendiri, dengan adanya kegiatan tersebut banyak manfaatnya.

Dalam kegiatan pembinaan tentu tidak selamanya berjalan lancar, atau dengan kata lain pembinaan tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terjadi karena masih ditemukan adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Secara umum hambatan dalam Pembinaan, antara lain adalah: kekurangserasian hubungan antara lingkungan sosial, belum

³⁸ Murhan Effendie, Kader Partai Golkar, Wawancara Pribadi, Jam 11.00-12.00 Wita, DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan, 29 April 2014

adanya aturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur tentang pembinaan.

Dalam mengatasi hambatan tersebut pihak interenlah yang sigap dalam mengatasinya. Hasil yang diinginkan dari kegiatan pembinaan tersebut diantaranya tercapainya visi dan misi yang sebagai acuan dasar dalam semua kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Nama : Murdiansyah, S.Sos, M.AP
- Tempat/tgl lahir : Banjarmasin, 19 Februari 1974
- Umur : 40 Tahun
- Pendidikan terakhir : S-2 Administrasi Publik
- Jabatan Organisasi : Wakil Sekretaris Bidang Organisasi
- Alamat : Jl. Lambung Mangkurat³⁹

Resonden berikutnya adalah bapak Murdiansyah yang jabatannya sebagai Korbid Organisasi. Beliau menjelaskan Bahwa untuk mewujudkan tujuan partai Golkar, diantaranya adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia, serta mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum dan hak asasi manusia.

³⁹ Murdiansyah, Kader Partai Golkar, Wawancara Pribadi, Jam 14.00-15.00 Wita, DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan, 23 April 2014

Berkaitan dengan hal-hal tersebut aspek organisasi partai golkar adalah merupakan bagian penting yang harus dibangun, dikembangkan, dan dioptimalkan perannya dalam memberi daya dukung untuk menggerakkan seluruh sistem organisasi dalam pencapaian sasaran program umum partai golkar. Dalam hal ini salah satunya dengan adanya kegiatan pembinaan keislaman yang dilaksanakan oleh kader golkar, bentuknya bermacam-macam yang rutin diadakan seperti kegiatan safari ramadhan, semarak maulid, pengajian Al-hidayah. Metode yang digunakan dalam pembinaan tersebut dengan ceramah.

Faktor pendukung dengan adanya kegiatan ini adalah adalah dari masyarakat sendiri yang menginginkan kegiatan yang menambah banyak wawasan Islami. Untuk kendala dalam kegiatan ini tidak terlalu besar dan dapat diselesaikan oleh pihak interen baik berupa finansial. Hasil yang dicapai dengan adanya kegiatan ini adalah guna tercapainya visi dan Misi partai golkar salah satunya mewujudkan masyarakat madani.

4. Nama : Muhammad Iqbal Permana, S.Sos
- Tempat/tgl lahir : Banjarmasin, 01 Januari 1968
- Umur : 46 Tahun
- Pendidikan terakhir : S-1 Sosial
- Jabatan Organisasi : Korbid. Rumah Tangga
- Alamat : Jl. Lambung Mangkurat⁴⁰

⁴⁰ M Iqbal Permana, Kader Partai Golkar, Wawancara Pribadi, Jam 10.00-11.00 Wita, DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan, 05 Mei 2014

Responden menjelaskan bahwa pembinaan keislaman itu diwujudkan dalam rangka menggali potensi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia. Untuk itu, dalam rangka pembinaan keislaman diterapkan dalam berbagai bentuk pembinaan. Sebagaimana pembinaan yang dilaksanakan Kader Partai Golongan Karya antara lain seperti pengajian rutin Al-Hidayah, Pesantren Kilat, Safari Ramadhan dan masih banyak lainnya.

Metode yang digunakan dalam pembinaan keislaman oleh Kader Partai Golongan Karya dengan ceramah, diskusi dan lain sebagainya. Adapun faktor pendukung dari adanya kegiatan tersebut dari peserta sendiri karena dengan adanya kegiatan tersebut peserta banyak bertambah ilmu keagamaan yang sebelumnya belum dia ketahunya.

Dalam masalah hambatan responden mengatakan kurang tepat waktunya peserta dalam menghadiri acara yang dilaksanakan. Tapi tidak masalah cuma beberapa orang aja yang seperti itu masih banyak yang peserta yang tepat waktu. Upaya yang dilakukan dalam mengatsi adanya hambatan tersebut dengan mengingatkan peserta untuk datang lebih awal demi acara kelancaran acara dalam pembinaan keislaman tersebut.

Setiap kegiatan pasti ada tujuan yang bisa diperoleh, tentunya para kader menginginkan dengan adanya acara pembinaan tersebut bisa tercapainya visi dan misi Partai Golongan karya salah satunya, lebih mendekatkan diri kepada masyarakat jadi terciptanya hubungan harmonis antara kader partai Golkar dan masyarakat.

5. Nama : Sarmili
- Tempat/tgl lahir : Banjarmasin, 21 Februari 1973
- Umur : 41 Tahun
- Pendidikan terakhir : SMA
- Jabatan Organisasi : Wakil Sekretaris Tk.1 Satkar Ulama
- Alamat : Jl. Sungai Andai Komp. Herlina Perkasa
No. 69 Banjarmasin.⁴¹

Responden berikutnya bapak Sarmili beliau menjelaskan banyak hal, mengenai bentuk-bentuk pembinaan yang ada dilaksanakan di DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan diantaranya Safari ramadhan, pengajian Al-Hidayah, mengadakan buka bersama waktu bulan Ramadhan dan banyak yang lainnya. Mengenai metode yang digunakan dalam pembinaan keislaman dengan ceramah. Dalam hal kegiatan pembinaan ini perangkat yang digunakan seperti pengeras suara.

Dalam kegiatan pembinaan keislaman faktor-faktor pendukung kegiatan ini baik dari peserta sendiri maupun masyarakat yang semangat untuk mengikutinya. Hambatan dalam pembinaan tidak ada cuma masalah kecil dan dapat diatasi langsung oleh pihak interen atau pihak kader partai Golkar sendiri.

Hasil yang diinginkan dalam pembinaan keislaman ini adalah adanya perubahan sikap atau tindakan pada diri peserta atau masyarakat itu sendiri menuju pada sikap yang berkepribadian baik. Perubahan sikap prilaku yang terjadi

⁴¹ Sarmili, Kader Partai Golkar, Wawancara Pribadi, Jam 11.00-12.00 Wita, DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan, 07 Mei 2014

adalah seperti keteladanan baik dalam perkataan, ibadah maupun perilaku kesehariannya. Dan juga terwujudnya visi dan misi partai Golkar.

6. Nama : Irma Wati, SE
- Tempat/tgl lahir : Banjarmasin, 25 september 1990
- Umur : 23 Tahun
- Pendidikan terakhir : S-1 Manajemen
- Jabatan Organisasi : Anggota AMPG
- Alamat : Jl. Lambung Mangkurat⁴²

Responden selanjutnya saudari Irma Wati dalam wawancara saya laksanakan, responden menjelaskan bahwa bentuk-bentuk pembinaan yang telah dilaksanakan seperti pesantren kilat, pengajian Al-Hidayah, Maulid Nabi, Safari Ramadhan yang rutin diadakan setiap tahunnya. Adapun metode yang digunakan ada yang ceramah, pelatihan dan lain sebagainya.

Maulid nabi dilaksanakan untuk mengingatkan masyarakat kepada nabi Muhammad. Di dalam maulid juga diadakan kegiatan semarak maulid. Kegiatan pembinaan keislaman ini perangkat yang digunakan sebagaimana besar sudah disediakan masing-masing peserta sendiri seperti peralatan tulis. Faktor-faktor pendukung dalam hal pembinaan ini dari masyarakat sendiri yang menginginkan dan mendukung para kader-kader dalam melaksanakan kegiatan pembinaan keislaman tersebut.

⁴² Irma Wati, Kader Partai Golkar, Wawancara Pribadi, Jam 10.00-11.00 Wita, DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan, 08 Mei 2014

Partai Golkar meskipun bukan partai Islam didalamnya banyak sekali kegiatan keagamaan. Untuk hambatan yang dihadapi cuma ada keterlambatan dana tapi dapat diatasi secara cepat. Dari kegiatan itu, hasil yang diinginkan partai golkar menginginkan terwujudnya visi dan misi Partai Golkar. Dan juga mengharapkan adanya perubahan pola perilaku pada diri masyarakat itu sendiri menuju pada perilaku yang berkepribadian yang lebih baik

7. Nama : Dina Herlina Sari
- Tempat/tgl lahir : Banjarmasin, 24 Juni 1993
- Umur : 20 Tahun
- Pendidikan terakhir : SMK
- Jabatan Organisasi : Anggota KPPG
- Alamat : Jl. Lambung Mangkurat⁴³

Responden berikutnya adalah saudari Dina dari anggota KPPG struktur organisasi yang menempatkan sayap dalam hal ini KPPG (kesatuan Perempuan Partai Golkar) sebagai bagian dalam struktur organisasi secara vertikal, adapun tujuan dan peran bidang pemberdayaan perempuan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki bagi setiap perempuan Kalimantan Selatan.

Responden menjelaskan bahwa bentuk-bentuk pembinaan Keislaman Partai Golkar adalah Pegajian Al-Hidayah yang rutin diadakan setiap sebulan sekali yang diadakan di DPD Partai Golkar. Metode yang digunakan dalam hal

⁴³ Dina Herlina Sari, Kader Partai Golkar, Wawancara Pribadi, Jam 10.00-11.00 Wita, DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan, 09 Mei 2014

pembinaan tersebut dengan ceramah yang di dalam pengajian tersebut banyak materi-materi yang disampaikan yang menambah pengetahuan Islami.

Kegiatan pembinaan keislamaan Al-Hidayah ini dikhususkan buat perempuan yang diadakan rutin setiap sebulan sekali. Adapun faktor-faktor pendukung dari kegiatan ini dari para peserta sendiri yang antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Untuk hambatan tidak ada kata responden Cuma masalah cuaca yang sering hujan jadi dari peserta banyak yang tidak hadir. Hasil yang diinginkan dari kegiatan ini tidak lain dengan adanya perubahan perilaku pada diri peserta ataupun masyarakat itu sendiri menuju pada perilaku yang berkepribadian muslim. Perubahan perilaku yang terjadi adalah seperti keteladanan baik dalam perkataan, ibadah maupun perilaku kesehariannya.

8. Nama : Doni Risrianto
- Tempat/tgl lahir : Banjarmasin, 3 juni 1970
- Umur : 44 Tahun
- Pendidikan terakhir : SMA
- Jabatan Organisasi : Kepala Sekretariat DPD Prov. KALSEL
- Alamat : Jl. Handil Bakti, Kom. Persada Permai No. 186
Banjarmasin.⁴⁴

Pembinaan keislaman menurut responden adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan. Dalam hal ini responden menyebutkan bahwa bentuk-bentuk pembinaan keislaman yang ada di DPD Partai

⁴⁴ Doni Risrianto, Kader Partai Golkar, Wawancara Pribadi, Jam 11.00-12.00 Wita, DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan, 13 Mei 2014

Golkar Provinsi Kalimantan Selatan diantaranya Safari Ramadan yang rutin diadakan setiap tahunnya, ada semarak maulid, pengajian Al-Hidayah, Pesanteren kilat dan lain sebagainya.

Di sini peran Kader dalam pembinaan keislaman sangat penting, hal ini sangat membantu agar membentuk sikap atau perilaku kader-kader yang berkualitas nantinya. Adapun faktor-faktor pendukung dari kegiatan ini adalah sangat antusias para peserta ataupun masyarakat dalam mengikuti kegiatan yang diadakan partai Golkar karena sangat bermanfaat.

Hambatan-hambatan dalam kegiatan kadang telatnya agaran untuk pelaksanaan tapi dapat langsung diatasi para kader. Dari kegiatan pembinaan keislaman yang diadakan hasil yang dituju supaya terwujudnya visi dan misi partai golkar. dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berakhlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis dan adil sehingga akan terwujudnya mayarakat madani yang mandiri, terbuka, berkesadaran hukum dan lingkungan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaan serta disiplin yang tinggi.

B. ANALISIS DATA

Analisis tentang Peran Kader Partai Golongan Karya (GOLKAR) Dalam Pembinaan Kehidupan Beragama di Kalimantan Selatan untuk mewujudkan masyarakat madani.

Peran kader partai Golongan Karya kota Bajarmasin dalam pembinaan kehidupan beragama dinilai sudah cukup baik, dilihat dari banyaknya kegiatan

baik yang berbentuk pengajian-pengajian, ceramah agama, diskusi-diskusi serta melalui kegiatan sosial keagamaan. Seperti kegiatan sebagai berikut:

- a. Peringatan tahun baru islam
- b. Memperingati hari asyura
- c. Peringatan maulid nabi besar Muhammad saw
- d. Safari ramadhan di 13 kabupaten/kota se Kalimantan selatan
- e. Mengadakan Badan Amil Zakat (BAZ) di bulan Ramadhan
- f. Halal bihalal seluruh pengurus partai golkar provinsi kalsel
- g. Menyembelih hewan qur'ban
- h. Mengadakan pengajian-pengajian
- i. Mengadakan Pesantren Kilat

Dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh Kader Partai Golongan Karya DPD Provinsi Kalimantan Selatan yang dijadikan penelitian, maka penulis dapat mengambil beberapa analisis, yaitu:

1. Peringatan tahun baru islam

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan peringatan tahun baru islam atau memperingati 1 Muharram, Kader memiliki peran penting dalam pelaksanaan dimana kader berperan sebagai panitia pelaksana. Didalam peringatan tahun baru islam ada kegiatan dakwah atau ceramah dimana panitia mengundang seorang penceramah dari luar kota.

Dari kegiatan pelaksanaan oleh Kader Partai Golongan Karya DPD Provinsi Kalimantan Selatan, dilaksanakan dalam rangka silaturahmi sesama kader maupun masyarakat, juga tujuan yang berusaha diraih oleh partai tercakup dalam Visi dan Misi partai. Semua ini dilakukan dalam rangka mewujudkan Masyarakat madani. Kader Partai Golkar sebagai sebuah partai politik menuntut kadernya dalam pembinaan yang dilakukan agar tidak hanya sekedar belajar dan menjadikannya sebagai pemahaman semata, namun kader hendaknya bergerak untuk memperjuangkannya.

Kader partai Golkar juga berusaha mengajarkan kader partai maupun masyarakat agar selalu memahami dunia dan peristiwa yang terjadi secara politis, serta mampu melihat berbagai indikasi politik. Kesadaran politik yang dimiliki kader partai politik diperlukan untuk mengerti dan bisa mengungkap permainan politik dan penyimpangan penguasa yang ada. Dengan beberapa karakter atau sifat kader partai politik ini lah, Kader Partai Golkar berusaha menjalankan aktivitas partai dengan benar dan istiqomah. Dengan menjadikan pemahaman Aqidah dan Akhlak sebagai kesempurnaan keimanan.

2. Memperingati hari Asyura

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan memperingati hari asyura, peran kader partai golongan karya disini sebagai panitia pelaksana kegiatan. Acara yang diadakan dalam hari asyura mengadakan ceramah yang diadakan di 13 kabupaten kota.

Dengan diadakan kegiatan ini melalui metode ceramah agama diharapkan bisa menambah keimanan, meningkatkan ketakwaan, menambah wawasan religi

sekaligus mempererat silaturahmi sesama kader maupun masyarakat. Selain itu tujuannya untuk sarana pendekatan diri partai golongan karya terhadap masyarakat. Walaupun partai golongan karya bukan partai yang bercorak islam, banyak kegiatan sosial agama yang dilaksanakannya.

Dengan terlaksananya kegiatan ini partai golkar mengharapkan bisa terwujudnya visi dan misi partai yaitu terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berakhlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka, berkesadaran hukum dan lingkungan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaannya serta disiplin yang tinggi.

3. Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad saw

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan peringatan kegiatan Maulid, peran kader partai Golongan Karya sangat penting disini kader berperan sebagai pelaksana kegiatan. Dalam peringatan Maulid kader Golkar mengadakan kegiatan yang namanya Semarak Maulid, kegiatan ini diisi dengan berbagai lomba, salah satunya lomba Habsyi.

Kegiatan Habsyi ini merupakan even tahunan untuk syiar agama dan bentuk kecintaan kepada Nabi Besar Muhammad saw. selain itu juga untuk mewadahi kreativitas anak muda yang menekuni seni budaya yang berpondasi nilai agama dan kearifan lokal.

Dalam kegiatan pelaksanaan semarak Maulid Habsyi ini dapat meningkatkan tali silaturahmi antar kader golongan karya sendiri juga silaturahmi sesama warga. Karena itu kegiatan ini juga melibatkan masyarakat setempat dalam kepanitiaan.

4. Safari ramadhan di 13 kabupaten/kota se Kalimantan Selatan

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Safari ramadhan di 13 kabupaten/kota se Kalimantan selatan oleh kader Golongan Karya ini dilakukan rutin setiap tahunnya. Kader partai terlibat langsung dalam kegiatan ini karena kader yang ada di DPD turun langsung ke tiap-tiap kabupaten. Kader disini berperan sebagai panitia sekaligus pelaksana. Acara kegiatan ini di adakan di masjid yang sebelumnya sudah disiapkan oleh DPD Tingkat Kabupaten

Kegiatan ini selain tujuan utama silaturahmi juga diisi ceramah agama, diskusi dan juga ada buka bersama. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan mampu menambah keimanan, meningkatkan ketakwaan, menambah wawasan, juga bisa mempererat tali silaturahmi baik sesama kader sendiri maupun masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk melaksanakan pembinaan pada umumnya, dapat ditempuh melalui beberapa bentuk pembinaan seperti melalui pengajian-pengajian, ceramah agama, diskusi-diskusi serta melalui kegiatan sosial keagamaan yang memperkuat keimanan dan memperluas pemahamannya tentang kehidupan bermasyarakat dan beragama

5. Mengadakan Badan Amil Zakat (BAZ) di bulan Ramadhan.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan badan amil zakat ini, peran kader partai golongan karya DPD provinsi Kalimantan Selatan sangatlah penting. Kader disini berperan langsung sebagai panitia pelaksana, adanya pembentukan badan amil zakat ini kegiatannya sebagai penyalur untuk dibagikan yang berhak menerima zakat tersebut. Jadi kader mengumpulkan zakat baik dari masyarakat maupun para kader sendiri dan kemudian menyalurkannya ke yang berhak.

Adapun tujuan dari diadakan pelaksanaan badan amil zakat ini salah satunya untuk memudahkan pendistribusian zakat akan sesuai dengan perintah, dan tersalurkan secara merata. Kader memiliki peranan penting untuk mengatur dan mengkoordinasikan tindakan panitia dalam mencapai tujuan. Tanpa adanya struktur yang jelas, panitia akan bekerja tanpa arah, bekerja menurut kemauannya sendiri dan akhirnya tidak hanya organisasi itu yang dirugikan tetapi juga masyarakat.

Zakat merupakan sumber dana yang cukup potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan suatu organisasi yang profesional untuk mengelolanya. Pengelolaan zakat yang dimaksud adalah mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sehingga pembentukan badan amil zakat ini bermanfaat sekali untuk masyarakat khususnya di Banjarmasin.

6. Halal bihalal seluruh pengurus partai Golongan Karya provinsi Kalimantan selatan.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan halal bihalal, peran kader sangat penting sebagai panitia untuk menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk kelancaran acara halal bihalal, acara halal bihalal dilaksanakan di DPD partai golkar propinsi Kalimantan selatan, yang dihadiri seluruh pengurus partai golkar.

Tradisi halal bihalal ini sangat menarik dan perlu dilestarikan. Sebab, tujuan halal bihalal ini sangat mulia, dan mampu merekatkan kembali persaudaraan yang tercerai berai. Silaturahmi tahunan yang dikemas dengan halal bihalal ini sangat tepat, karena saat ini manusia diburu dengan waktu. Sehingga, dalam sehari sudah bisa bertemu dengan semua pengurus partai golongan karya, tanpa harus memakan waktu yang cukup panjang dan melelahkan. Walaupun tidak dipungkiri, cara silaturahmi dari rumah kerumah itu lebih baik, karena lebih kuat ikatan persaudaraanya.

Melaksanakan Halal Bihalal, memang itu tidak ada ajaran langsung dari Nabi saw, bukan berarti itu tersesat. Sebab, Halal Bihalal itu adalah bentuk silaturahmi tahunan dan silaturahmi itu anjuran dan ajaran Rosulullah saw. oleh karena itu kader partai golongan karya mengadakan halal bihalal ini dengan rutin tiap tahunnya.

7. Menyembelih hewan qur'ban

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penyembelihan hewan korban, peran kader partai golongan karya disini sebagai panitia penyalur hewan qurban. Jadi panitia menyalurkan hewan qurban ke tempat-tempat yang sudah ditentukan. Panitia membuka pendaftaran orang yang mau berqurban dari kalangan kader golongan

karya sendiri dan kemudian akan disalurkan oleh kader atau panitia setempat yang sudah ditentukan.

Terlaksananya kegiatan ini tidak terlepas kerjasama antar pengurus dan kader Partai Golongan Karya. Kader Partai Golkar juga menyediakan daging hewan qurban untuk siapa saja yang ingin mengkonsumsinya, tanpa memandang yang bersangkutan, sebab kegiatan ini merupakan implementasi dari kegiatan sosial keagamaan.

8. Mengadakan pengajian-pengajian

Berdasarkan hasil Analisis yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengajian-pengajian yang di adakan di DPD partai golgar provinsi Kalimantan selatan, salah satu pengajian yang rutin diadakan adalah pengajian Al Hidayah, pengajian yang dikhususkan untuk perempuan. Peran kader dalam kegiatan ini sebagai peserta, yang mengikuti kegiatan ini bisa dari masyarakat umum.

Kegiatan ini bermanfaat sekali untuk menambah wawasan agama juga menambah tali silaturahmi baik bagi kader ataupun masyarakat. Di dalam kegiatan ini materinya ada pembelajaran aqidah, akhlak dan pengetahuan agama yang lain. kegiatan pengajian al hidayah ini rutin diadakan sebulan sekali yang bertempat di DPD partai golongan karya.

Kader partai golongan karya berharap dengan adanya kegiatan pengajian-pengajian ini ada perubahan perilaku pada diri masyarakat dan juga kader pada perilaku yang berkepribadian yang lebih baik. Perubahan perilaku yang terjadi

adalah seperti keteladanan baik dalam perkataan, ibadah maupun perilaku kesehariannya.

9. Mengadakan Pesantren Kilat

Berdasarkan hasil analisis, yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pesantren kilat. Kader Partai Golongan Karya memiliki peran penting dalam kegiatan pesantren kilat karena semua acara kegiatan sudah direncanakan dengan sebaik-baiknya. Peran Kader GOLKAR disini sebagai panitia dan pelaksana. Lamanya kegiatan pesantren kilat berkisar antara tiga hari, satu minggu sampai dengan satu bulan. Adapun materi yang diajarkan dalam kegiatan pesantren kilat meliputi membaca Al-Qur'an, keimanan islam, Fiqih (ibadah), dan Ahklaq.

Kader Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan dengan adanya pelaksanaan kegiatan ini atau pesantren kilat dapat menanamkan iman dan takwa yang lebih kuat lagi untuk para peserta yang mengikutinya. Tujuan-tujuan lain dari adanya pelaksanaan pesantren kilat ini adalah:

a. Peningkatan Ketauhidan

Salah satu tujuan dari diadakannya pesantren kilat antara lain yaitu untuk lebih meningkatkan kedalaman akan pengertian dan makna tauhid bagi peserta remaja. Sebab hampir dipastikan bahwa remaja-remaja bermasalah, mereka sedang mengalami krisis iman di dalam hatinya. Bukan hanya itu, arti "Tuhan" itu sendiri sangat tipis dalam hatinya, yang membuat ia tidak ragu untuk berbuat kemungkaran.

Jika dalam diri seorang remaja tercipta hubungan baik dengan dzat yang maha Kuasa, tentu segala perbuatannya akan terkontrol, sebab disamping takut untuk berbuat dosa, ia menganggap perbuatan sia-sia yang dilakukannya, tidak akan membawa manfaat sedikitpun bahkan merugikan diri sendiri. Untuk itu pendalaman ketauhidan bagi remaja bukan hanya sangat penting, namun suatu keharusan untuk mencegah efek-efek negatif di zaman globalisasi ini. Melalui pesantren kilat inilah para peserta dikenalkan dengan moral-moral islami.

Dalam pesantren kilat inilah diharapkan para remaja yang semula menyimpang dari ajaran-ajaran islam biasa dipergunakan untuk tali kendali dalam kehidupan sehariannya. Dan para remaja lainnya yang tidak pernah terlibat dengan kenakalan remaja bisa lebih memperdalam ilmu-ilmu keagamaannya, agar dapat mempertebal imannya.

Di dalam makna ketauhidan itu sendiri, nantinya manusia akan menemukan faedah hubungan manusia dengan Allah SWT yakni suatu penghambaan diri dengan penuh kepasrahan. Karena pada dasarnya hakikat manusia di ciptakan antara lain agar dia mengabdikan kepada Allah.

b. Pengembangan Kepribadian

Adapun tujuan dari pengembangan suatu kepribadian adalah : Menjadikan manusia dewasa yang sanggup untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri serta mandiri.

Menurut pandangan penulis, dengan di letakkannya pengembangan kepribadian sebagai salah satu tujuan dari pesantren kilat ini, karena telah nyata bahwa suatu kepribadian sangat erat hubungannya dengan moral dan akhlak. Jika

seseorang mempunyai kepribadian yang luhur, pemikiran positif, tentu hal-hal buruk tidak akan di lakukannya.

Untuk mencapai kepribadian secara utuh hanya mungkin di bentuk melalui pengaruh lingkungan, khususnya pendidikan. Adapun sarana yang di tuju dalam pembentukan kepribadian ini adalah kepribadian yang memiliki akhlak yang mulia. Tingkat kemuliaan akhlak seseorang erat kaitannya dengan tingkat keimanan. Pencapaian tingkat akhlak yang mulia merupakan tujuan pembentuk kepribadian muslim. Disini terlihat ada dua sisi penting dalam pembentuk kepribadian muslim, yaitu: iman dan akhlak.

c. Keterampilan Bersosialisasi

Satu lagi tujuan dari pesantren kilat, yakni untuk mengajak kepada santrinya untuk mengasah ketrampilan dalam berbagai bidang, termasuk ketrampilan bersosialissi, sebab ketrampilan-ketranpilan ini juga sangat mendukung terciptanya keselarasan dalam pergaulan.

Dengan mengikuti kegiatan pesantren kilat, baik daalam liburan panjang maupun khusus dalam bulan ramadhan itu sendiri untuk para siswa sudah merupakan ajang latihan bersosialisasi yang baik. Begitu juga dengan mengikuti organisasi-organisasi seperti remaja masjid, pemuda Islam dan lain sebagainya juga merupakan sosialisasi yang baik pula.

Seseorang yang telah mempunyai ketrampilan bersosialisasi akan bisa memilih teman bergaul yang baik, yang tidak menjerumuskan ke dalam hal-hal yang negatif. Sebab seperti yang telah disebutkan di atas, faktor lingkungan dan pergaulan merupakan faktor yang paling sering menimbulkan keracunan dalam

jiwa. Dengan ketrampilan dalam bergaul, dimana ketrampilan tersebut telah dilandasi dengan dasar-dasar akhlak yang luhur, maka ia bisa memilih dan memilah, mana teman yang harus diikuti dan mana teman yang harus dijauhi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan hasil analisis sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Peranan Kader Partai Golongan Karya (GOLKAR) Dewan Pengurus Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Pembinaan kehidupan Beragama di Kalimantan Selatan untuk mewujudkan masyarakat madani, dinilai sudah cukup baik. Kader yang berperan sebagai panitia kegiatan juga sebagai pelaksana kegiatan. Dalam pembinaan banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Seperti

kegiatan: Peringatan tahun baru islam, Memperingati hari asyura, Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad saw, Safari ramadhan di 13 kabupaten/kota se Kalimantan Selatan, Mengadakan Badan Amil Zakat (BAZ), Halal bihalal seluruh pengurus partai Golkar provinsi kalsel, Menyembelih hewan qur'ban, Mengadakan pengajian-pengajian, dan Mengadakan Pesantren Kilat. Dengan adanya pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Kader GOLKAR bertujuan adanya perubahan perilaku pada diri masyarakat itu sendiri menuju pada perilaku yang berkepribadian muslim. Perubahan perilaku yang terjadi adalah seperti keteladanan baik dalam perkataan, ibadah maupun perilaku kesehariannya.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut , maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu pembinaan yang lebih intensif agar hasil yang diinginkan lebih maksimal. Dengan cara menggunakan metode-metode yang baru yang belum pernah dilaksanakan, supaya membuat ketertarikan masyarakat dan rasa penasaran sehingga lebih banyak lagi peminat dalam mengikuti pembinaan.
2. Perlu melanjutkan penelitian kembali terhadap para akademisi dalam sudut pandang yang berbeda, seperti peranan kinerja organisasi Sayap Partai Golkar di DPD Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Selatan.